



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas anggaran yang dikelola. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelapor, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. Laporan keuangan suatu entitas dibuat bukan tanpa satu tujuan tertentu, secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2. Management

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang–undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman ; dan

- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan SKPD disusun dengan berdasar pada prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPKD untuk menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.2. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu kepada:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Perkembangan APBD
- 2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Pendapatan
- 3.2. Belanja.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
 - a. Pendapatan
 - b. Belanja
 - c. Aset
 - d. Kewajiban
 - e. Ekuitas Dana

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Latar Belakang dan Pengertian PDRB

Di dalam perencanaan pembangunan ekonomi di suatu daerah diperlukan data statistik yang dapat dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan bahan perencanaan di masa yang akan datang. Salah satu data statistik yang sangat diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan ekonomi adalah produk domestik regional bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto yang lebih populer dengan pendapatan regional merupakan takaran makro yang digunakan untuk mengamati perekonomian suatu wilayah atau daerah, baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya). Selain indikator- indikator lain, pendapatan regional sangat banyak digunakan oleh para birokrasi pemerintah, peneliti, dan masyarakat dalam mengevaluasi perekonomian. Bahkan yang lebih penting, berbagai kebijakan pembangunan pada umumnya memakai data yang bersumber dari pendapatan regional.

PDRB dengan berbagai data suplemen lainnya yang merupakan indikator makro ekonomi, dapat digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan daerah. informasi ini sangat diperlukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk mengartikan PDRB kita dapat menggunakan tiga pendekatan. Manfaat Menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB):

- a. Untuk bahan evaluasi pembangunan dimasa lalu, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional secara keseluruhan.
- b. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- c. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang
- d. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor perekonomian di suatu wilayah

- e. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyaknya tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.

Macam – Macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan penghitungan , ada dua macam PDRB, sebagai berikut :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu PDRB yang penghitungannya berdasarkan harga tahun yang sedang berjalan atau harga tahun yang sedang berlaku,
- b. PDRB atas dasar harga konstan, yaitu yang penghitungannya berdasarkan harga suatu tahun yang tetap/konstan yang dipakai sebagai tahun dasar.

Tujuan menghitung PDRB atas dasar harga konstan adalah untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil (nyata) yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, baik inflasi maupun deflasi.

PDRB Kabupaten Sleman 2023 atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi 12,44%, konstruksi dengan kontribusi 11,29%, informasi dan komunikasi sebesar 10,28%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,26%, dan jasa pendidikan sebesar 10,17%.

Secara lengkap tentang peranan masing-masing sektor terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat di tabel berikut:

Kategori PDRB Non Migas	PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,17%	8,00%	7,65%	7,96%	8,06%
B.Pertambangan dan Penggalian	0,38%	0,37%	0,33%	0,32%	0,33%
C.Industri Pengolahan	13,09%	13,40%	13,06%	12,59%	12,44%
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
F.Konstruksi	12,57%	11,03%	11,64%	11,52%	11,29%
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,78%	7,85%	7,58%	7,72%	7,68%
H.Transportasi dan Pergudangan	7,04%	4,39%	3,86%	4,19%	4,42%
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,39%	8,87%	9,14%	9,89%	10,26%
J.Informasi dan Komunikasi	7,88%	9,81%	10,83%	10,47%	10,28%

K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,32%	3,45%	3,44%	3,60%	3,71%
L.Real Estate	7,80%	8,39%	8,00%	7,70%	7,54%
M,N.Jasa Perusahaan	1,68%	1,53%	1,56%	1,58%	1,64%
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,65%	7,01%	6,68%	6,46%	6,19%
P.Jasa Pendidikan	9,48%	10,63%	10,68%	10,20%	10,17%
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35%	3,08%	3,06%	2,98%	3,09%
R,S,T,U.Jasa lainnya	2,25%	2,03%	2,33%	2,66%	2,73%
Produk Domestik Regional Bruto	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber Url: <https://slemankab.bps.go.id/indicator/52/8/1/pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>
Diakses pada 24 Juli 2024

PDRB Kabupaten Sleman 2023 atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,09% dibandingkan PDRB tahun 2022, yaitu 37.596.424,38 di tahun 2022 menjadi 39.508.676,90 di tahun 2023. Sedangkan industri yang mendominasi adalah informasi dan komunikasi dengan kontribusi 14,84%. Konstruksi berkontribusi 11,87%, industri pengolahan berkontribusi 11,53%, dan jasa pendidikan berkontribusi 10,56%.

PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha:

Kategori PDRB Non Migas	PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,97%	6,54%	6,28%	6,38%	6,08%
B.Pertambangan dan Penggalian	0,38%	0,36%	0,32%	0,31%	0,31%
C.Industri Pengolahan	12,62%	12,66%	12,10%	11,69%	11,53%
D.Pengadaan Listrik dan Gas	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
F.Konstruksi	12,55%	10,95%	11,52%	11,58%	11,87%
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51%	7,42%	7,11%	7,12%	7,05%
H.Transportasi dan Pergudangan	6,05%	4,01%	3,54%	3,81%	3,90%
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,13%	8,65%	8,85%	9,40%	9,74%
J.Informasi dan Komunikasi	10,89%	13,61%	15,07%	14,88%	14,84%
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	3,01%	3,14%	3,05%	3,07%	3,21%
L.Real Estate	8,15%	8,61%	8,19%	8,03%	7,91%
M,N.Jasa Perusahaan	1,93%	1,73%	1,76%	1,80%	1,85%
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,72%	5,84%	5,51%	5,38%	5,23%

P.Jasa Pendidikan	10,15%	11,16%	11,12%	10,70%	10,56%
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,46%	3,07%	3,03%	2,99%	3,02%
R,S,T,U.Jasa lainnya	2,33%	2,07%	2,37%	2,69%	2,73%
Produk Domestik Regional Bruto	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Url: <https://slemankab.bps.go.id/indicator/52/31/1/pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html>
Diakses pada 24 Juli 2024

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB tiga tahun yakni tahun 2020 sebesar -4.05% mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun 2019 sebesar 6.48%. Hal ini disebabkan dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020. Namun tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sleman meningkat cukup signifikan mencapai angka 5.61% dan pada tahun 2022 mencapai 5.15%.

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman selama periode tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi (turun naik) yaitu dari 2,24% pada tahun 2018 naik menjadi 2,55% pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 1,48% di tahun 2020 dan naik menjadi 2,29% tahun 2021. Tingkat inflasi tahun 2022 naik menjadi sebesar 6,49%. (*sumber data: BPS Kab Sleman*).

d. Penanaman Modal

Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah, menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

2.2. **Perkembangan APBD**

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024 merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya disahkan menjadi APBD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran.

Anggaran yang dikelola BKAD berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah yang dikelola BKAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kontribusi Dana Penguatan Modal.

Adapun perkembangan alokasi anggaran BKAD pada tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Alokasi Anggaran BKAD Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

Komponen Anggaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
PENDAPATAN	2.771.155.649.035,00	2.729.354.910.949,00	2.875.290.552.405,00

Komponen Anggaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	828.560.950.675,00	840.349.442.198,00	861.719.488.209,00
Pajak Daerah	752.820.000.000,00	758.180.000.000,00	781.751.000.000,00
Retribusi Daerah	1.035.914.900,00	1.975.384.000,00	1.975.384.940,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38.657.466.216,00	41.594.058.198,00	42.893.103.269,00
Lain-lain PAD Yang Sah	36.047.569.559,00	38.600.000.000,00	35.100.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.935.940.596.061,00	1.878.761.330.751,00	2.005.051.756.661,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.430.601.786.089,00	1.389.465.099.000,00	1.488.158.936.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	139.140.652.000,00	141.379.516.000,00	154.217.393.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	366.198.157.972,00	347.916.715.751,00	362.675.427.661,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	10.244.138.000,00	8.519.307.535,00
Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	10.244.138.000,00	8.519.307.535,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
BELANJA	565.141.272.677,01	580.372.495.992,00	591.381.038.799,00
Belanja Operasi	112.219.818.361,00	114.057.396.275,00	108.459.136.889,00
Belanja Pegawai	38.691.417.445,00	39.368.702.751,00	37.438.376.151,00
Belanja Barang dan Jasa	73.528.400.916,00	74.688.693.524,00	71.020.760.738,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	44.438.577.764,00	3.388.334.700,00	3.799.039.800,00
Belanja Modal Tanah	40.003.946.356,00	1.000.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.797.935.452,00	1.852.234.700,00	3.384.039.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.000.000,00	141.100.000,00	110.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	554.695.956,00	395.000.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	305.000.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	43.075.302.001,01	23.313.952.903,00	21.750.302.203,00
Belanja Tak Terduga	43.075.302.001,01	23.313.952.903,00	21.750.302.203,00

Komponen Anggaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
BELANJA TRANSFER	365.407.574.551,00	439.612.812.114,00	457.372.559.907,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	82.029.591.298,00	79.991.825.409,00	83.991.825.409,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	916.696.000,00	170.000.000,00	259.071.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	135.000.000,00	131.696.000,00	144.625.610,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	282.326.287.253,00	359.319.290.705,00	372.977.037.888,00
SURPLUS/DEFISIT	2.206.014.376.357,99	2.148.982.414.957,00	2.283.909.513.606,00

Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 mengelola belanja sebesar Rp. 591.381.038.799,00 Program dan Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	78.540.000,00
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	78.540.000,00
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Keistimewaan	78.540.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.100.841.810,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.573.995,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.643.720,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.091.600,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.349.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.274.900,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.451.375,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.517.179.351,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.788.816.151,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	641.900.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	86.463.200,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.377.741.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.377.741.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.141.785.400,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.789.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780.438.400,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	155.400.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.158.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.820.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.820.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.920.666.164,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.290.516.664,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.149.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.895.900,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	640.250.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.050.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.595.900,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	960.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	483.216.690.884,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.497.760.800,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	210.595.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	146.696.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	12.405.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	12.405.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	31.950.000,00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.823.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.315.806.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	113.689.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	636.390.500,00
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	759.945.724,00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.291.000,00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	157.249.150,00
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0,00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.890.900,00
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	266.884.674,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.130.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	129.500.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	768.582.250,00
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	74.733.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	512.229.850,00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	170.987.400,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.632.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	479.190.402.110,00
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	67.540.000,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	373.380.734.498,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.750.302.203,00
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	83.991.825.409,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.216.941.430,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	774.206.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	313.970.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	
Pengamanan Barang Milik Daerah	748.665.000,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.664.957.930,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	496.354.500,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	218.788.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.768.024.675,00
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	17.768.024.675,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	130.759.900,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	175.082.400,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	639.098.500,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	363.700.000,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	356.655.000,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	758.956.800,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	532.505.000,00
Penagihan Pajak Daerah	12.361.781.000,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	85.535.800,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.259.051.375,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	104.898.900,00
Jumlah	591.381.038.799,00

2.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada prinsip dan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

a. Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipasi karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan demokrasi. Ini artinya adanya peluang yang sama untuk memberikan suara dan menyatakan pilihan bagi semua warga masyarakat tanpa pengecualian.

b. Keterlibatan

Adanya keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan yang merasakan langsung dari efek kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan. Sebab pada dasarnya yang menjadi kepedulian utama dalam kebijakan publik adalah masalah publik itu sendiri.

c. Transparansi

Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengeluaran daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Dua aspek penting dalam pelaksanaan transparansi dalam kebijakan pengelolaan keuangan adalah aksesibilitas dan akurasi informasi. Aksesibilitas pengelolaan keuangan dilakukan melalui penyajian informasi melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan uang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Prinsip-prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah:

- i. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengeluaran daerah dilakukan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- iii. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.

Wujud dari pelaksanaan akuntabilitas adalah:

1. Penggunaan dana dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dari masing-masing kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi yang telah ditentukan
 2. Pelaksanaan pembukuan atas pelaksanaan APBD dilakukan dengan sistem akrual dan double entry oleh setiap entitas akuntansi (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
 3. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
 4. Laporan Keuangan SKPD menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
- e. Disiplin Anggaran
- Disiplin anggaran dimaksudkan untuk memperhatikan antara lain:
- i. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai, belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
 - ii. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
 - iii. Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.
- f. Efisiensi, Efektivitas dan Ekonomis Anggaran
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan dengan masukan tertentu.
- Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

2.3.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektifitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial

2.3.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah yang dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja Belanja Pegawai dan Belanja Operasi

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Pendapatan

Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2.875.290.552.405,00 sampai dengan 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp1.547.754.217.587,62 atau mencapai 53,83%.

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
Pendapatan Asli Daerah	861.719.487.269,00	493.808.780.215,62	57,31
Pajak Daerah	781.751.000.000,00	443.315.048.467,00	56,71
Retribusi Daerah	1.975.384.000,00	871.433.595,00	44,11
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	42.893.103.269,00	41.458.835.842,00	96,66
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah BLUD	35.100.000.000,00	8.163.462.311,62	23,26
Pendapatan Transfer	2.005.051.756.661,00	1.049.853.984.099,00	52,36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.488.158.936.000,00	806.756.026.325,00	54,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	154.217.393.000,00	115.129.936.300,00	74,65
Pendapatan Transfer Antar Daerah	362.675.427.661,00	127.968.021.474,00	35,28
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	48,03
Pendapatan Hibah	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	48,03
JUMLAH PENDAPATAN	2.875.290.551.465,00	1.547.754.217.587,62	53,83

3.1.2. Belanja

Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp591.381.038.799,00 sampai dengan 30 Juni 2024 terealisasi sebesar Rp265.072.444.869,96 atau mencapai 44,82% yang terdiri dari:

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	78.540.000,00	30.813.437,00	39,23	47.726.563,00
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	78.540.000,00	30.813.437,00	39,23	47.726.563,00
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Keistimewaan	78.540.000,00	30.813.437,00	39,23	47.726.563,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	84.100.841.810,00	42.838.092.480,71	50,94	41.262.749.329,29

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.573.995,00	20.345.250,00	30,56	46.228.745,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.643.720,00	18.068.250,00	36,40	31.575.470,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.500,00	0,00	0,00	1.762.500,00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.091.600,00	0,00	0,00	2.091.600,00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.349.900,00	0,00	0,00	2.349.900,00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.274.900,00	0,00	0,00	2.274.900,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.451.375,00	2.277.000,00	26,94	6.174.375,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.517.179.351,00	17.221.615.661,65	45,90	20.295.563.689,35
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.788.816.151,00	16.984.734.152,65	46,17	19.804.081.998,35
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	641.900.000,00	194.425.000,00	30,29	447.475.000,00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	86.463.200,00	42.456.509,00	49,10	44.006.691,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.377.741.000,00	385.308.423,06	27,97	992.432.576,94
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.377.741.000,00	385.308.423,06	27,97	992.432.576,94
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.141.785.400,00	765.073.289,00	35,72	1.376.712.111,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	122.789.000,00	17.188.350,00	14,00	105.600.650,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	93.878.955,00	46,94	106.121.045,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	780.438.400,00	304.031.923,00	38,96	476.406.477,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	152.941.500,00	43,70	197.058.500,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	155.400.000,00	37.169.000,00	23,92	118.231.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.158.000,00	159.863.561,00	29,98	373.294.439,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.820.000.000,00	1.236.060.000,00	43,83	1.583.940.000,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.820.000.000,00	1.236.060.000,00	43,83	1.583.940.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.920.666.164,00	22.537.700.244,00	59,43	15.382.965.920,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.000.000,00	72.323.100,00	57,40	53.676.900,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.290.516.664,00	22.229.739.624,00	59,61	15.060.777.040,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.149.500,00	235.637.520,00	46,74	268.511.980,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.296.895.900,00	363.145.242,00	28,00	933.750.658,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	640.250.000,00	218.139.666,00	34,07	422.110.334,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.050.000,00	79.774.876,00	41,76	111.275.124,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	465.595.900,00	65.230.700,00	14,01	400.365.200,00
5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	960.000.000,00	308.844.371,00	32,17	651.155.629,00
5.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	960.000.000,00	308.844.371,00	32,17	651.155.629,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	483.216.690.884,00	210.658.643.260,00	43,60	272.558.047.624,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.497.760.800,00	668.070.329,00	26,75	1.829.690.471,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	210.595.900,00	17.647.172,00	8,38	192.948.728,00

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	146.696.000,00	0,00	0,00	146.696.000,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	12.405.000,00	0,00	0,00	12.405.000,00
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	12.405.000,00	0,00	0,00	12.405.000,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	31.950.000,00	15.247.500,00	47,72	16.702.500,00
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	17.823.000,00	0,00	0,00	17.823.000,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.315.806.200,00	443.694.632,00	33,72	872.111.568,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	113.689.200,00	20.872.500,00	18,36	92.816.700,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	636.390.500,00	170.608.525,00	26,81	465.781.975,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	759.945.724,00	330.657.488,00	43,51	429.288.236,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.291.000,00	46.024.900,00	52,73	41.266.100,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	157.249.150,00	37.249.500,00	23,69	119.999.650,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.890.900,00	11.410.200,00	15,65	61.480.700,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	266.884.674,00	149.920.200,00	56,17	116.964.474,00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.130.000,00	33.201.188,00	71,97	12.928.812,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	129.500.000,00	52.851.500,00	40,81	76.648.500,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	768.582.250,00	433.892.263,00	56,45	334.689.987,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	74.733.000,00	42.734.350,00	57,18	31.998.650,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	512.229.850,00	300.307.643,00	58,63	211.922.207,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	170.987.400,00	87.108.070,00	50,94	83.879.330,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.632.000,00	3.742.200,00	35,20	6.889.800,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	479.190.402.110,00	209.226.023.180,00	43,66	269.964.378.930,00
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	67.540.000,00	18.814.260,00	27,86	48.725.740,00

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	373.380.734.498,00	174.104.967.782,00	46,63	199.275.766.716,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21.750.302.203,00	7.653.440.700,00	35,19	14.096.861.503,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	83.991.825.409,00	27.448.800.438,00	32,68	56.543.024.971,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.216.941.430,00	2.679.398.639,25	43,10	3.537.542.790,75
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.216.941.430,00	2.679.398.639,25	43,10	3.537.542.790,75
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	774.206.000,00	170.127.430,00	21,97	604.078.570,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	313.970.000,00	56.126.100,00	17,88	257.843.900,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	748.665.000,00	468.518.956,64	62,58	280.146.043,36
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.664.957.930,00	1.610.488.759,61	43,94	2.054.469.170,39
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	496.354.500,00	269.626.393,00	54,32	226.728.107,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	218.788.000,00	104.511.000,00	47,77	114.277.000,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.768.024.675,00	8.865.497.053,00	49,90	8.902.527.622,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	17.768.024.675,00	8.865.497.053,00	49,90	8.902.527.622,00
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	130.759.900,00	19.426.000,00	14,86	111.333.900,00
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	175.082.400,00	53.252.325,00	30,42	121.830.075,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	639.098.500,00	417.891.808,00	65,39	221.206.692,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	363.700.000,00	60.514.837,00	16,64	303.185.163,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	356.655.000,00	215.212.383,00	60,34	141.442.617,00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	758.956.800,00	395.906.016,00	52,16	363.050.784,00
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	532.505.000,00	248.047.799,00	46,58	284.457.201,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	12.361.781.000,00	6.234.050.635,00	50,43	6.127.730.365,00
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	85.535.800,00	29.973.500,00	35,04	55.562.300,00
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.259.051.375,00	1.128.852.000,00	49,97	1.130.199.375,00
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	104.898.900,00	62.369.750,00	59,46	42.529.150,00
	Jumlah	591.381.038.799,00	265.072.444.869,96	44,82	326.308.593.929,04

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Daerah. Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD menggunakan *accrual*. SAP berbasis *accrual* adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis *accrual*, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah atas pos-pos pada laporan keuangan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi

persyaratan setara kas, surat berharga harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Klasifikasi

- a. Kas terdiri atas:
 - 1) kas di kas daerah;
 - 2) kas di bendahara penerima;
 - 3) kas di bendahara pengeluaran;
 - 4) kas di entitas BLUD
 - 5) kas dana Bos
 - 6) Kas Dana Kapitasi pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- b. Setara kas terdiri atas:
 - 1) simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - 2) surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) bulan

Pengakuan

- 1) Penerimaan kas berasal dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer;
 - c. lain-lain pendapatan yang sah; dan
 - d. penerimaan pembiayaan.
- 2) Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya arus masuk kas;
 - a. ke Kas Daerah untuk penerimaan yang disetor langsung ke rekening kas umum daerah; atau
 - b. ke Kas Satuan Kerja untuk penerimaan yang disetor ke rekening bendahara penerimaan satuan kerja
- 3) Pengeluaran kas terdiri dari:
 - a. belanja; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pengeluaran kas diakui pada saat terjadi arus keluar kas:
 - a. dari Kas Daerah untuk pengeluaran yang ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah; atau
 - b. dari kas Satuan Kerja untuk pengeluaran yang ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran satuan kerja.

- 5) Pengeluaran kas dari Kas Daerah ke Satuan Kerja untuk uang persediaan bendahara pengeluaran merupakan peralihan aset dari entitas pelaporan ke Satuan Kerja

Pengukuran

- a. Kas dan setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan keuangan. Dalam hal ini terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/kerugian.

Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara dengan kas di CALK sekurang-kurangnya mengungkapkan posisi dan rincian kas pada saat tanggal pelaporan keuangan.

2. Piutang

1. Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima sumber daya ekonomi dan/ atau sosial dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Piutang timbul antara lain karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah antara lain:
 - 1) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - 2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas; dan/atau
 - 3) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Klasifikasi

Piutang diklasifikasikan antara lain:

- a) Piutang Pajak Daerah
Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam undang–undang perpajakan, yang belum dilunasi
- b) Piutang Retribusi

Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang belum dilunasi.

- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Merupakan piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD/perusahaan swasta
- d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Lain-lain PAD yang Sah meliputi antara lain piutang karena perikatan, bunga/jasa giro, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan BLUD
- e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Yaitu piutang dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat
- f) Piutang Transfer Antar Daerah
Yaitu piutang transfer yang berasal dari pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya
- g) Piutang Lainnya
Terdiri atas bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, uang muka, transaksi dibayar dimuka dan piutang yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan f.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak Daerah, diakui pada saat:
 - 1) SPTPD disampaikan kepada Bupati untuk pajak yang dibayar sendiri (*self assessment*).
 - 2) Diterbitkannya SPPT, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- b) Piutang Retribusi, diakui pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD, SKRDKB, dan SKRDKBT.
- c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, diakui pada saat telah diumumkan pembagiannya deviden dan/atau pembagian laba.

Pengukuran

1. Piutang Pajak Daerah, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang pajak yang belum dilunasi.
2. Piutang Retribusi, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah piutang retribusi yang belum dilunasi.
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah dividen atau bagi hasil laba usaha BUMD/perusahaan swasta yang belum dilunasi.
4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar nilai nominal
5. Piutang karena tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal pengakuan yang bersangkutan sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Ketetapan pejabat yang berwenang.
6. Piutang PAD lainnya, dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat penagihan.
7. Piutang akibat penjualan dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam naskah perjanjian penjualan.
8. Piutang Transfer, dicatat sebesar ketetapan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.
9. Piutang Lainnya, dicatat sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis piutang dan umur piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Piutang disajikan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang.

1. Piutang Pajak

Untuk piutang pajak dengan nilai nominal sama dengan atau lebih besar Rp. 100.000.000,00 per penanggung utang.

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d 2 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat tagihan	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 2 s.d. 5 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat teguran	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 tahun dan/atau sudah diterbitkan surat paksa	100%

Untuk piutang pajak dengan nilai nominal kurang dari Rp. 100.000.000,00 per penanggung utang.

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d. 2 tahun	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 2 s.d. 5 tahun	50%
4.	Macet	Lebih dari 5 tahun	100%

2. Piutang Retribusi

No.	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Kurang dari atau sama dengan 1 bulan dan/atau sampai dengan jatuh tempo	0,5%

No.	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
2.	Kurang lancar	Lebih dari 1 s.d.3 bulan dan/atau sudah diterbitkan surat teguran	10%
3.	Diragukan	Lebih dari 3 bulan s.d. 12 bulan dan/atau sudah diterbitkan surat tagihan	50%
4.	Macet	Lebih dari 12 bulan dan/atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	100%

Pengungkapan

Piutang disajikan neto, yaitu setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang.

Cadangan kerugian piutang merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan kriteria kualitas piutang (Permendagri No.73 Tahun 2015).

Umur piutang dihitung sejak saat timbulnya hak tagih sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Informasi tentang jenis piutang, asal piutang, jumlah piutang, jumlah cadangan kerugian piutang dan dasar cadangan kerugian piutang dijelaskan dalam CaLK.

Penghapusan

Penghapusan Piutang, dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- 1. Secara Langsung yaitu penghapusan secara mutlak
- 2. Secara bertahap yaitu penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara langsung dengan penghapusan mutlak dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih, dan tidak perlu dicatat secara *extracomptable*. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati.

Perlakuan akuntansi penghapusan piutang secara bertahap dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih dan mencatat piutang secara *extra comptable* saat penghapusan bersyarat. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Dan menghapus pencatatan secara extra

saat penghapusan mutlak. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Terhadap piutang yang sudah dilakukan penghapusan secara mutlak juga menghapuskan upaya tagih secara perdata.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- e. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- f. Persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Persediaan Barang Pakai Habis
 - (1) Bahan
 - (2) Suku Cadang
 - (3) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
 - (4) Obat-obatan
 - (5) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - (6) Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
 - (7) Natura dan Pakan
 - (8) Persediaan Penelitian
 - (9) Persediaan dalam Proses

- b. Persediaan Barang Tak Habis Pakai
 - (1) Komponen
 - (2) Pipa
- c. Persediaan Barang Bekas Dipakai
 - (1) Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Pengakuan

- 1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- 3. persediaan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan

Persediaan diakui pada saat:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;

Pengukuran

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
- b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan.
- d. Persediaan hewan dan tanaman, dinilai dengan menggunakan nilai perolehan.
- e. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak.
- f. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode MPKP.
- g. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- h. Penjelasan lain yang relevan.

4. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain:

- 1) deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*),
- 2) surat berharga yang mudah diperjualbelikan/ dicairkan, dan
- 3) investasi jangka pendek lainnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri atas:

- 1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
 - a) penyertaan modal
 - b) investasi permanen lainnya
- 2) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:
 - a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) dana yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengakuan

Investasi diakui apabila memenuhi kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengakuan hasil investasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
- c. Hasil investasi berupa bunga diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
- d. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi.
- e. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Secara periodik, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk cadangan penghapusan atas investasi non permanen berupa dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang disajikan di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan umur dana bergulir.

Pengukuran

- a. Investasi jangka pendek
- b. Investasi jangka panjang

- 1) Investasi permanen
- 2) investasi non permanen
 - a) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
 - b) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek sampai diserahkan kepada pihak ketiga

Penilaian

Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehannya. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi, atau

b. Metode ekuitas

Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan pendapatan, atau

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi

Digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam jangka waktu dekat

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20 % menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20 % sampai dengan 50 % tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metoda ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50 % menggunakan metode ekuitas
- d. Kepemilikan dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari nilai perolehan Dana bergulir. Besarnya persentase penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun	0,5%
2.	Kurang lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 s.d. 3 tahun	10%
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 3 s.d. 5 tahun	50%
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 5 tahun	100%

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
- b. Jenis-jenis investasi
- c. Perubahan harga pasar
- d. Penurunan nilai investasi tetap yang signifikan dan penyebabnya
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya
- f. perubahan pos investasi

5. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, terdiri atas:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai
- b. Peralatan dan mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
Peralatan dan mesin terdiri atas:

- 1) alat-alat besar
 - 2) alat-alat angkutan
 - 3) alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) alat studio dan komunikasi
 - 7) alat-alat kedokteran
 - 8) alat-alat laboratorium
 - 9) alat-alat keamanan
- c. Gedung dan bangunan
- Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai
- d. Jalan, irigasi dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- Aset tetap lainnya antara lain:
- 1) buku perpustakaan
 - 2) barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) hewan ternak serta tanaman
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f. Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan

Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:

- 1) Biaya persiapan tempat
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan, dan bongkar muat (*handling cost*)
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*)
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
- 5) Biaya perijinan
- 6) Biaya konstruksi

Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.

- b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
- c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.
- d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan mutasi aset tetap lainnya:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pengurangan/pelepasan
 - 3) Perubahan nilai, jika ada
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan
 - 3) Masa manfaat
 - 4) Tarif penyusutan yang digunakan
 - 5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas aset tetap
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap
- h. Informasi penting lain yang relevan

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap.

Pengeluaran belanja pemeliharaan dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);
 - 2) Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); atau

- 3) Meningkatkan kualitas kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik)
- b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) Menambah fungsi
 - 2) Mengubah fungsi
 - 3) Menambah aksesoris/komponen peralatan
- c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
 - 2) Meningkatkan kualitas

Penghentian dan pelepasan aset tetap (*retirement and disposal*)

Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selesai masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Alat angkut darat bermotor	7
2.	Alat pemeliharaan tanaman	4
3.	Alat kantor	5

4.	Alat rumah tangga	5
5.	Peralatan komputer	4
6.	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
7.	Alat studio	5
8.	Alat komunikasi	5
9.	Alat keamanan dan perlindungan	5
10	Bangunan gedung tempat kerja	50

Penilaian kembali aset tetap

Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas Dana Diinvestasikan pada Aset Tetap.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri atas:

- a. Tagihan Jangka Panjang
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga
- c. Aset tak berwujud

Yaitu, aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis-jenis aset tak berwujud:

- 1) *Goodwill*
- 2) Lisensi
- 3) Hak paten
- 4) Royalti
- 5) Aset tak berwujud lainnya
- 6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan yaitu pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan keuangan.
 - a) *Software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu sehingga dapat digunakan di komputer lain.

- b) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.
- d. Aset lain-lain

Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Pengakuan

- a. Aktiva Tak Berwujud, diakui ketika memenuhi kriteria:
 - 1) Dapat diidentifikasi:
 - a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibagi secara jelas dengan aset-aset yang lain pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 - b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
 - 2) Pengendalian

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
 - 3) Manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.
- b. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a. Aktiva tak berwujud

- 1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut
- 2) Aset tak berwujud dilakukan amortisasi secara garis lurus, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas

b. Aset lain-lain

- 1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke aset lain-lain disajikan menurut nilai buku
- 2) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasikan kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Pengungkapan

a. Aktiva tak berwujud

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa
- 3) Penambahan ataupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan

b. Aset lain-lain

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan pemberhentian penggunaan dan informasi lainnya yang relevan.

7. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja Pemerintah Daerah;
- b. keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri

Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban jangka pendek

Yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, terdiri atas:

- 1) Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan
- 2) Utang bunga
- 3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya.
- 4) Bagian lancar utang jangka panjang
- 5) Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

- b. Kewajiban jangka panja

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut membuat Pemerintah Daerah harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga.

Pengukuran

- a. Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu jumlah rupiah yang akan dibayarkan
- b. Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal pelaporan keuangan.

Pengungkapan

Kewajiban diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar penjadwalan utang. Informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan perjanjian utang;
- b. Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya kewajiban sebelum jatuh tempo;

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan keuangan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ekuitas
- b. R/K PPKD
- c. R/K SKPD

Pengakuan

- a. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah
- b. R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja , untuk mencatat:
 - 1) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan/atau penyerahan aset non kas ke Pemerintah Daerah.
 - 2) Sisi Kredit: Penerimaan otorisasi pencairan kas dari SKPKD dan / atau penerimaan aset non kas dari Pemerintah Daerah.
- c. R/K SKPD digunakan oleh SKPKD, untuk mencatat:
 - 1) Sisi Debet: Penerbitan otorisasi pencairan kas dan / atau penyerahan aset non kas ke Satuan Kerja.
 - 2) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan / atau penerimaan aset non kas dari Satuan Kerja.
- d. R/K PPKD dan R/K SKPD dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Pengungkapan

Pengungkapan ekuitas dalam CaLK memuat informasi lainnya terkait posisi ekuitas pada tanggal pelaporan keuangan.

10. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

Klasifikasi

Pendapatan-LRA diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerima Satuan Kerja atau bendahara penerimaan BLUD atau kas daerah

Pengukuran

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan
- c. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
- b. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- c. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- d. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya

11. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

Pengakuan

- a. pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga
- b. pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja

Pengukuran

Belanja dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Pengungkapan

- a. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP
- b. Rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK
- c. Penjelasan mengenai belanja tahun bersangkutan apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- d. penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya.

12. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pajak Daerah dengan pemungutan *Official Assessment* diakui ketika SKPD dan/ atau SPPT, SK Pengurangan, SK Keberatan, SK Pembatalan atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan.
2. Pajak daerah dengan pemungutan *self assesment* diakui ketika Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD dan/atau telah ditetapkan SKPSKB, SKPDKBT.

3. Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan laporan harian, kecuali retribusi sejenis dengan penetapan.
4. Lain-lain PAD yang sah diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
5. Pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asa bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dalam mata uang asing dicatat dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pengungkapan

- a. Rincian pendapatan –LO sesuai dengan SAP
- b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika terjadi hal-hal yang bersifat khusus
- c. Penjelasan sebab-sebab selisih pencapaian target penerimaan pendapatan daerah dengan realisasinya
- d. Informasi lain yang dianggap perlu

13. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Klasifikasi

Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

- a. Saat timbulnya kewajiban;

- 1) Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran;
 - 2) Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang;
 - 3) Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut diterima;
 - 4) Beban lain-lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut disahkan; atau
- b. saat terjadinya konsumsi aset; atau
- 1) Beban penyusutan diakui saat akhir bulan;
 - 2) Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika pengadaan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan setelah tanggal 15;
- c. Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan
- d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga;
 - 2) Beban Persediaan diakui pada saat digunakan.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:

- a. besaran timbulnya kewajiban, atau
- b. besaran terjadinya konsumsi aset, atau
- c. besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar

Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian lebih lanjut jenis beban diungkapkan dalam CaLK.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Kabupaten Sleman disusun menggunakan basis kas sehingga Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis kas Dengan basis tersebut maka pengakuan pos-pos dalam LRA adalah sebagai berikut:

- a Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan satuan kerja atau Bendahara BLUD;
- b Transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah dan/atau pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran satuan kerja;
- c Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah dan/atau bendahara pengeluaran

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Anggaran dan realisasi pendapatan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	861.719.488.209,00	493.808.780.215,62
	Pendapatan Pajak Daerah	781.751.000.000,00	443.315.048.467,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.975.384.940,00	871.433.595,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	41.458.835.842,00
	Lain-lain PAD yang Sah	35.100.000.000,00	8.163.462.311,62
2	Pendapatan Transfer	2.005.051.756.661,00	1.049.853.984.099,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.488.158.936.000,00	806.756.026.325,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	154.217.393.000,00	115.129.936.300,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	362.675.427.661,00	127.968.021.474,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00
	Pendapatan Hibah	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00
	Jumlah	2.875.290.552.405,00	1.547.754.217.587,62

Pendapatan – LRA merupakan pendapatan yang diakui pada saat terjadi arus kas masuk yang menambah kekayaan daerah Sebagian pendapatan tersebut berasal dari pelunasan pendapatan tahun lalu

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	861.719.488.209,00	493.808.780.215,62

Pemungutan PAD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran dan Realisasi dari komponen PAD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	781.751.000.000,00	443.315.048.467,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.975.384.940,00	871.433.595,00
3	Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	41.458.835.842,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.100.000.000,00	8.163.462.311,62
	Jumlah	861.719.488.209,00	493.808.780.215,62

a Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	781.751.000.000,00	443.315.048.467,00

Pendapatan pajak daerah diperoleh dari beberapa komponen pajak sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PAJAK REKLAME - LRA	12.141.000.000,00	5.887.870.148,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	11.000.000.000,00	5.669.446.320,00
	Pajak Reklame Kain	990.000.000,00	173.651.702,00
	Pajak Reklame Berjalan	151.000.000,00	44.772.126,00
2	PAJAK AIR TANAH - LRA	8.500.000.000,00	4.358.137.705,00
	Pajak Air Tanah	8.500.000.000,00	4.358.137.705,00
3	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - LRA	5.110.000.000,00	1.067.486.000,00
	Pajak Granit/Andesit	110.000.000,00	0,00
	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	204.582.000,00
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00	862.904.000,00
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN - LRA	78.000.000.000,00	67.132.162.233,00
	PBBP2	78.000.000.000,00	67.132.162.233,00
5	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) -	237.000.000.000,00	111.047.123.819,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	202.000.000.000,00	106.645.412.167,00
	BPHTB-Pemberian Hak Baru	35.000.000.000,00	4.401.711.652,00
6	PAJAK RESTORAN	157.000.000.000,00	90.604.468.952,00
	PBJT-Restoran	144.000.000.000,00	84.895.524.057,00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	13.000.000.000,00	5.708.944.895,00
7	PAJAK PENERANGAN JALAN - LRA	121.000.000.000,00	71.540.313.034,00
	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	121.000.000.000,00	71.540.313.034,00
8	PAJAK HOTEL - LRA	143.000.000.000,00	79.159.464.622,00
	PBJT-Hotel	138.000.000.000,00	77.220.192.803,00
	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	5.000.000.000,00	1.939.271.819,00
9	PAJAK PARKIR - LRA	3.000.000.000,00	2.043.830.045,00
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	3.000.000.000,00	2.043.830.045,00
10	PAJAK HIBURAN - LRA	17.000.000.000,00	10.474.191.909,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang	8.300.000.000,00	4.642.895.269,00
	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.000.000.000,00	851.755.075,00
	PBJT-Pameran	1.150.000.000,00	555.493.596,00
	PBJT-Permainan Ketangkasan	2.000.000.000,00	2.904.973.737,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang	2.000.000.000,00	402.067.650,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	550.000.000,00	409.292.675,00
	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar,	1.000.000.000,00	707.713.907,00
	Jumlah	781.751.000.000,00	443.315.048.467,00

b Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	1.975.384.940,00	871.433.595,00

Pendapatan retribusi daerah diperoleh dari beberapa komponen retribusi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LRA	631.970.870,00	520.398.595,00
	Penyewaan Tanah Dan Bangunan - LRA	631.970.870,00	345.505.840,00
	Penyewaan Tanah - LRA	0,00	30.946.850,00
	Penyewaan Bangunan - LRA	0,00	131.335.905,00
	Pemakaian Ruangan - LRA	0,00	10.960.000,00
	Pemakaian Kendaraan Bermotor - LRA	0,00	1.650.000,00
2	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA- LRA	1.343.414.070,00	351.035.000,00
	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	1.343.414.070,00	351.035.000,00
Jumlah		1.975.384.940,00	871.433.595,00

c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	41.114.982.751,00	40.558.835.842,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.778.120.518,00	900.000.000,00
Jumlah		42.893.103.269,00	41.458.835.842,00

d Lain-lain PAD yang Sah

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Lain - lain PAD yang sah	35.100.000.000,00	8.163.462.311,62

Lain-lain PAD yang Sah diperoleh dari beberapa komponen sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA - LRA	32.500.000.000,00	8.155.502.311,62
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	372.052.700,00
	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	68.436.000,00
	Hasil Penjualan Tanaman	0,00	0,00
	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.500.000.000,00	732.837.481,00
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	121.595.838,00
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	4.277.190.627,72
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.446.650,90
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	58.413.145,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	493.631.206,00
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	8.480.898,00
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	179.467,00
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	2.335.010,00
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	7.397.044,00
	Pendapatan Denda Pajak MBLB	0,00	27.836.165,00
	Pendapatan Denda Pajak PBBP2	0,00	996.817.566,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	86.486.984,00
	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	114.069.394,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00
	Pendapatan BLUD	2.600.000.000,00	785.296.135,00
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	7.960.000,00
Jumlah		35.100.000.000,00	8.163.462.311,62

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer	2.005.051.756.661,00	1.049.853.984.099,00	1.943.930.482.278,88

Pendapatan transfer yang diterima di rekening Kas Umum Daerah merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat direalisasikan berdasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 . Besar pendapatan ini sepenuhnya merupakan otoritas pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi direalisasikan berdasar APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Realisasi dari masing-masing komponen pendapatan transfer Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.488.158.936.000,00	806.756.026.325,00	1.400.012.073.781,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	154.217.393.000,00	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00
3	Transfer Antar Daerah	362.675.427.661,00	127.968.021.474,00	371.121.139.997,88
Jumlah		2.005.051.756.661,00	1.049.853.984.099,00	1.943.930.482.278,88

5.1.1.2. a Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.488.158.936.000,00	806.756.026.325,00	1.400.012.073.781,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	36.577.177.950,00	63.146.898.548,00
2	Dana Alokasi Umum	1.019.197.033.000,00	571.751.785.692,00	971.708.817.535,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	51.762.480.000,00	2.896.850.999,00	23.251.738.208,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	365.123.821.000,00	195.530.211.684,00	341.904.619.490,00
Jumlah		1.488.158.936.000,00	806.756.026.325,00	1.400.012.073.781,00

5.1.1.2. a.1 Dana Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Bagi Hasil	52.075.602.000,00	36.577.177.950,00	63.146.898.548,00

Realisasi Dana Bagi Hasil merupakan realisasi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dbh Pajak Bumi Dan Bangunan	894.832.000,00	527.428.900,00
2	Dbh PPH Pasal 21	47.343.519.000,00	34.188.099.600,00
3	Dbh Cukai Hasil Tembaku (CHT)	2.727.945.000,00	1.519.147.500,00
4	Dbh Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.576.000,00	3.861.200,00
5	Dbh Sumber Daya Alam (SDA) Mineral Dan Batubara-Landrent	1.065.000,00	7.541.250,00
6	Dbh Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (liuph)	29.854.000,00	8.956.200,00
7	Dbh Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	322.143.300,00

Jumlah	52.075.602.000,00	36.577.177.950,00
--------	-------------------	-------------------

Realisasi Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

- a) Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	25 Maret 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	161.496.400,00
2	25 Maret 2024	TDF DBH PBB	164.062.000,00
3	28 Juni 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota TW II Tahun 2024	201.870.500,00
Jumlah			527.428.900,00

- b) Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk Propinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	25 Maret 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	835.348.400,00
2	25 Maret 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	8.633.355.400,00
3	25 Maret 2024	TDF DBH PPh Pasal 21	15.141.949.000,00
4	25 Maret 2024	TDF DBH PPh Pasal 25/29	108.743.000,00
5	28 Juni 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	835.348.400,00
6	28 Juni 2024	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TW II	8.633.355.400,00
Jumlah			34.188.099.600,00

- c) Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	02 Januari 2024	DBH CHT TW IV 2023	155.175.000,00
2	28 Maret 2024	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Triwulan	545.589.000,00
3	28 Juni 2024	Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TW II tahun 2024	818.383.500,00
Jumlah			1.519.147.500,00

- d) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	25 Januari 2024	DBH, TRIWULAN I 2024 = 612412 DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	915.200,00
2	25 Maret 2024	DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap	1.802.000,00
3	24-Apr-24	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Tetap TW 2 tahun 2024	1.144.000,00
Jumlah			3.861.200,00

- e) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	25 Januari 2024	DBH, TRIWULAN I 2024 C245= 612311 DBH SDA Minerba - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	213.000,00
2	25 Maret 2024	TDF DBH SDA Minerba	7.062.000,00
3	24-Apr-24	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap Triwulan 2 Tahun 2024	266.250,00
Jumlah			7.541.250,00

- e) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	27 Maret 2024	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH Triwulan I	4.478.100,00
2	28 Juni 2024	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH TW II	4.478.100,00
Jumlah			8.956.200,00

- f) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Perikanan) dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	25 Januari 2024	DBH, TRIWULAN I 2024 = 612611 DBH SDA Perikanan (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	161.071.650,00
2	24-Apr-24	Alokasi DBH SDA yang disalurkan TW 2 Tahun 2024	161.071.650,00
Jumlah			322.143.300,00

5.1.1.2. a.2 Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.019.197.033.000,00	571.751.785.692,00	971.708.817.535,00

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAU	921.994.819.000,00	537.830.307.000,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	28.956.609.000,00	13.447.798.692,00
3	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan	40.073.616.000,00	12.022.084.000,00
4	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan	20.625.892.000,00	6.187.767.000,00
5	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum	7.546.097.000,00	2.263.829.000,00
Jumlah		1.019.197.033.000,00	571.751.785.692,00

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	02 Januari 2024	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya, JANUARI 2024, [621111004]	76.832.901.000,00
2	31 Januari 2024	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya, FEBRUARI 2024	76.832.901.000,00
3	29 Februari 2024	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	76.832.901.000,00
4	28 Maret 2024	Belanja Dana Alokasi Umum April 2024	76.832.901.000,00
5	30 April 2024	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan bulan Mei 2024	76.832.901.000,00
6	30 Mei 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan tahap I 2024	12.022.084.000,00
7	30 Mei 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan Tahap I 2024	6.187.767.000,00
8	31 Mei 2024	Belanja Dana Alokasi Umum Bulan Juni 2024	76.832.901.000,00
9	31 Mei 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum Tahap I 2024	2.263.829.000,00

10	14 Juni 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	3.362.266.803,00
11	14 Juni 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah Bulan Mei 2024	3.357.766.638,00
12	14 Juni 2024	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah Bulan April 2024	3.357.766.638,00
13	28 Juni 2024	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan Juli 2024	76.832.901.000,00
14	28 Juni 2024	Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan Juli 2024	3.369.998.613,00
Jumlah			571.751.785.692,00

5.1.1.2. a.3 Dana Alokasi Khusus - Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Fisik	51.762.480.000,00	2.896.850.999,00	23.251.738.208,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK fisik - bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian	840.000.000,00	840.000.000,00
2	DAK fisik-bidang irigasi-penugasan	2.606.500.000,00	651.624.999,00
3	DAK fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup	478.579.000,00	468.000.000,00
4	DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana	939.976.000,00	937.226.000,00
5	DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD	237.500.000,00	0,00
6	DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD	2.783.591.000,00	0,00
7	DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP	2.251.508.000,00	0,00
8	DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kesehatan rujukan	3.000.000.000,00	0,00
9	DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan	6.450.495.000,00	0,00
10	DAK fisik-bidang pariwisata-penugasan	2.700.530.000,00	0,00
11	DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan	15.058.690.000,00	0,00
12	DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan	5.620.000.000,00	0,00
13	DAK fisik-bidang usaha mikro, kecil dan menengah-penugasan	8.795.111.000,00	0,00
Jumlah		51.762.480.000,00	2.896.850.999,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	27 Juni 2024	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik	840.000.000,00
2	27 Juni 2024	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	651.624.999,00
3	27 Juni 2024	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	468.000.000,00
4	27 Juni 2024	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana	937.226.000,00
Jumlah			2.896.850.999,00

5.1.1.2. a.4 Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	365.123.821.000,00	195.530.211.684,00	321.588.047.700,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus - Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK non fisik-TPG PNSD	160.787.428.000,00	88.433.085.400,00
2	DAK non fisik-Tamsil Guru PNSD	2.936.110.000,00	1.614.860.500,00
3	DAK non fisik-BOKKB-BOK	10.373.666.000,00	4.935.992.239,00
4	DAK non fisik-BOKKB-Pengawasan obat dan makanan	427.311.000,00	96.950.723,00
5	DAK non fisik-PK2UKM	504.696.000,00	248.808.300,00
6	DAK non fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	958.000.000,00	479.000.000,00
7	DAK non fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	798.985.000,00	398.808.865,00
8	DAK non fisik-BOKB-KB	8.210.305.000,00	3.530.747.120,00
9	Dak non fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	160.443.150,00
10	DAK non fisik-Dana Katahanan Pangan dan Pertanian	2.805.550.000,00	1.374.189.720,00
11	Dak non fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00	986.380.000,00
12	Dak non fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	121.322.800.000,00	66.116.400.000,00
13	Dak non fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	5.455.000.000,00	0,00
14	Dak non fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	24.016.200.000,00	12.512.400.000,00
15	Dak non fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	540.000.000,00	0,00
16	Dak non fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.881.700.000,00	2.530.850.000,00
17	Dak non fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	0,00
18	Dak non fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	18.523.310.000,00	12.111.295.667,00
Jumlah		365.123.821.000,00	195.530.211.684,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerimaan	Uraian	Realisasi (Rp)
1	01 Februari 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan, 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tahap 1	60.195.100.000,00
2	01 Februari 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler	11.878.200.000,00
3	01 Februari 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler	2.440.850.000,00
4	06 Februari 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan, 654311 Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tahap 1	153.450.000,00
5	06 Februari 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler	94.200.000,00
6	01 Maret 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	4.701.971.667,00
7	06 Maret 2024	Alokasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disalurkan Tahap 1	986.380.000,00
8	20 Maret 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	312.850.000,00
9	22 Maret 2024	Dana Pelayanan Kepariwisataaan Tahap I	479.000.000,00
10	25 Maret 2024	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	248.808.300,00
11	25 Maret 2024	Dana Fasilitasi Penanaman Modal Tahap	398.808.865,00
12	27 Maret 2024	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahap I	3.530.747.120,00

13	27 Maret 2024	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahap I	160.443.150,00
18	2 April 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan tahap I	4.935.992.239,00
19	2 April 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan tahap I	96.950.723,00
20	14 Mei 2024	Triwulan I tahun 2024	880.833.000,00
21	17 Mei 2024	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah TW I 2021	48.236.228.400,00
22	5 Juni 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	5.455.000.000,00
23	5 Juni 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	540.000.000,00
24	5 Juni 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	90.000.000,00
25	07 Juni 2024	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah TW II	734.027.500,00
26	07 Juni 2024	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahap I	1.374.189.720,00
27	12 Juni 2024	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah TW II	40.196.857.000,00
28	26 Juni 2024	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	7.409.324.000,00
Jumlah			195.530.211.684,00

5.1.1.2. b Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	154.217.393.000,00	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	48.593.705.000,00
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	123.087.656.000,00	99.565.067.800,00	124.203.563.500,00
5	Insentif Fiskal	31.129.737.000,00	15.564.868.500,00	0,00
Jumlah		154.217.393.000,00	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00

5.1.1.2. b.1 Dana Insentif Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	48.593.705.000,00

5.1.1.2. b.2 Dana Otonomi Khusus

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan Dana Otonomi Khusus.

5.1.1.2. b.3 Dana Keistimewaan

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan Dana Keistimewaan.

5.1.1.2. b.4 Dana Desa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Desa	123.087.656.000,00	99.565.067.800,00	124.203.563.500,00

Adapun Dana Desa yang disalurkan dari Kementerian Keuangan langsung ke desa dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Tgl Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	1 April 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 1	34.336.444.800,00
2	1 April 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 1	1.719.639.800,00
3	1 April 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 1	33.549.192.600,00
4	1 April 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 1	1.120.925.400,00
5	25 Juni 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 2	15.747.296.000,00
6	25 Juni 2024	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa Tahap 2	13.091.569.200,00
Jumlah			99.565.067.800,00

5.1.1.2. b5 Insentif Fiskal

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Insentif Fiskal	31.129.737.000,00	15.564.868.500,00	0,00

No.	Tgl Penerimaan	Uraian	Realisasi
1	13 Juni 2024	Dana Insentif Daerah Insentif Fiskal - Reguler Tahap I	15.564.868.500,00
Jumlah			15.564.868.500,00

5.1.1.2. c Transfer Antar Daerah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Antar Daerah	362.675.427.661,00	127.968.021.474,00	454.227.185.187,50

Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	287.856.631.411,00	70.467.630.474,00	294.692.668.839,00
2	Bantuan Keuangan	74.818.796.250,00	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88
Jumlah		362.675.427.661,00	127.968.021.474,00	371.121.139.997,88

5.1.1.2. c.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	287.856.631.411,00	70.467.630.474,00	294.692.668.839,00

Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	101.638.373.696,00	22.696.497.709,00	105.057.680.062,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	51.103.848.304,00	9.826.037.334,00	49.964.448.896,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	78.096.667.600,00	16.769.146.870,00	87.297.460.819,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	47.424.395,00	16.431.565,00	47.424.395,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	56.970.317.416,00	21.159.516.996,00	52.325.654.667,00
Jumlah		287.856.631.411,00	70.467.630.474,00	233.854.622.951,00

5.1.1.2. c.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bantuan Keuangan	74.818.796.250,00	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88

Bantuan Keuangan terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
-----	--------	-----------------------	------------------------	------------------------

1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	74.818.796.250,00	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	0,00	0,00	0,00
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	0,00	0,00
Jumlah		74.818.796.250,00	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah air minum berbasis kinerja	8.519.307.535,00	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00

5.1.2 Belanja - LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	108.459.136.889,00	54.379.449.794,96
	Belanja Pegawai	37.438.376.151,00	17.197.759.152,65
	Belanja Barang dan Jasa	71.020.760.738,00	37.181.690.642,31
2	Belanja Modal	3.799.039.800,00	1.485.786.155,00
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.384.039.800,00	1.362.794.955,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	35.412.200,00
	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	305.000.000,00	87.579.000,00
3	Belanja Tak Terduga	21.750.302.203,00	7.653.440.700,00
	Belanja Tak Terduga	21.750.302.203,00	7.653.440.700,00
4	Belanja Transfer	457.372.559.907,00	201.553.768.220,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	83.991.825.409,00	27.448.800.438,00
	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	372.977.037.888,00	173.701.271.172,00
Jumlah		591.381.038.799,00	265.072.444.869,96

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan BKAD Kabupaten Sleman yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	37.438.376.151,00	17.197.759.152,65
2	Belanja Barang dan Jasa	71.020.760.738,00	37.181.690.642,31
Jumlah		108.459.136.889,00	54.379.449.794,96

5.1.2.1 a Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	37.438.376.151,00	17.197.759.152,65

Realisasi belanja pegawai dengan rincian berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	5.078.186.096,00	2.795.000.280,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	434.972.944,00	243.005.808,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	238.000.000,00	109.840.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	496.647.900,00	257.730.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	225.260.000,00	84.235.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	249.819.726,00	128.473.080,00
7	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	77.180.320,00	64.092.800,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.098.578,00	37.794,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	561.272.156,00	144.430.101,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	28.975.079,00	5.016.102,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	88.132.531,00	15.048.463,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.191.996.000,00	525.430.555,00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.442.714.000,00	635.888.100,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	26.582.682.451,00	11.976.506.069,65
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	91.878.370,00	0,00
16	Belanja Honorarium	502.260.000,00	161.175.000,00
17	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	102.300.000,00	33.250.000,00
18	Belanja Pegawai - BLUD	45.000.000,00	18.600.000,00
Jumlah		37.438.376.151,00	17.197.759.152,65

b Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	71.020.760.738,00	37.181.690.642,31

Realisasi belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	4.993.940.574,00	2.059.097.417,00
2	Belanja Jasa Kantor	48.227.171.664,00	27.323.417.548,67
3	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	120.100.000,00	99.673.100,00
4	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	260.000.000,00	224.900.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	620.000.000,00	0,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	424.500.000,00	22.800.000,00

7	Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non Asn Atas Pemungutan Pajak Daerah	443.000.000,00	221.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	572.555.000,00	295.642.285,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	922.094.500,00	159.359.137,64
10	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	168.384.000,00	45.377.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	202.000.000,00	0,00
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.367.039.000,00	2.765.953.783,00
12	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak	8.834.976.000,00	3.674.226.000,00
13	Belanja Barang Dan Jasa Blud	865.000.000,00	290.244.371,00
Jumlah		71.020.760.738,00	37.181.690.642,31

Realisasi belanja barang dan jasa BLUD merupakan belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan rincian berikut:

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja barang dan jasa - BLUD	290.244.371,00
Jumlah		290.244.371,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.384.039.800,00	1.362.794.955,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	35.412.200,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	305.000.000,00	87.579.000,00
Jumlah		3.799.039.800,00	1.485.786.155,00

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	135.600,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.820.000.000,00	1.236.060.000,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	346.667.400,00	94.056.000,00
4	Belanja Modal Komputer Unit	54.000.000,00	32.678.955,00
5	Belanja Modal Alat Studio	38.236.800,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan Olahraga	75.000.000,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	50.000.000,00	0,00
Jumlah		3.384.039.800,00	1.362.794.955,00

b Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	110.000.000,00	35.412.200,00
Jumlah		110.000.000,00	35.412.200,00

c Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	305.000.000,00	87.579.000,00
Jumlah		305.000.000,00	87.579.000,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Software SIM BPHTB	44.289.000,00
2	Belanja Modal Software SIMPAD	43.290.000,00
Jumlah		87.579.000,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Tak Terduga	21.750.302.203,00	7.653.440.700,00	14.096.861.503,00	14.593.248.470,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	00211/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian kelebihan pembayaran retribusipengendalian menara telekomunikasi Tahun Pajak2023	8.286.500,00
2	Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)	3.500.000.000,00
3	Bantuan Sosial TidakTerencana untuk korban bencana padabulan November, Desember 2023, Januari 2024	127.900.000,00
4	Bantuan Sosial TidakTerencana untuk korban bencana	126.550.000,00
5	Pengembalian BTT Bansos Tidak Terencana Untuk JPS	(200,00)
6	01615/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Pajak 2023	15.740.000,00
7	01935/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Pajak 2023	32.655.000,00
8	02446/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian Dana BOS PAUD TA. 2023	3.900.000,00
9	02500/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	228.672.500,00
10	Jaring Pengaman Sosial(JPS) bulan April sampai dengan Juni	3.500.000.000,00
11	Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk korban bencanapada bulan Februari, Maret dan April 2024	24.100.000,00
12	03563/LS-LAINNYA/2024 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Pajak 2022 dan Tahun Pajak 2023	85.636.900,00
Jumlah		7.653.440.700,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Transfer	457.372.559.907,00	201.553.768.220,00	255.818.791.687,00	464.819.528.455,00

Akun transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke entitas pelaporan lain. Anggaran Belanja transfer tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman No. 85 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	83.991.825.409,00	27.448.800.438,00	56.543.024.971,00	80.271.757.080,00
2	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	0,00	168.105.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	0,00	123.923.420,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	372.977.037.888,00	173.701.271.172,00	199.275.766.716,00	384.255.742.955,00

Jumlah	457.372.559.907,00	201.553.768.220,00	255.818.791.687,00	464.819.528.455,00
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	83.991.825.409,00	27.448.800.438,00	56.543.024.971,00	80.271.757.080,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	79.818.000.000,00	25.427.906.385,00	54.390.093.615,00	75.646.488.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	4.173.825.409,00	2.020.894.053,00	2.152.931.356,00	4.625.269.080,00
Jumlah		83.991.825.409,00	27.448.800.438,00	56.543.024.971,00	80.271.757.080,00

b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	259.071.000,00	0,00	168.105.000,00

c. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota Ke Provinsi	144.625.610,00	144.625.610,00	0,00	123.923.420,00

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi direalisasikan pada tanggal 8 Maret 2024.

d. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	372.977.037.888,00	173.701.271.172,00	199.275.766.716,00	384.255.742.955,00

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	125.919.190.938,00	42.418.254.026,00	83.500.936.912,00	123.970.190.950,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	123.087.656.000,00	70.726.202.600,00	52.361.453.400,00	124.203.563.500,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	123.970.190.950,00	60.556.814.546,00	63.413.376.404,00	136.081.988.505,00
Jumlah		372.977.037.888,00	173.701.271.172,00	199.275.766.716,00	384.255.742.955,00

5.1.3 Surplus Defisit

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	2.875.290.552.405,00	1.547.754.217.587,62	1.327.536.334.817,38	2.844.253.397.805,78
Belanja	591.381.038.799,00	265.072.444.869,96	326.308.593.929,04	593.523.782.616,00
Surplus/Defisit	2.283.909.513.606,00	1.282.681.772.717,66	1.001.227.740.888,34	2.250.729.615.189,78

5.1.4 Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	170.817.088.188,00	231.942.509.861,75	(61.125.421.673,75)	286.035.326.571,05
Pengeluaran Pembiayaan	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	147.817.088.188,00	208.942.509.861,75	(61.125.421.673,75)	261.035.326.571,05

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penggunaan SILPA	170.817.088.188,00	231.942.509.861,75	(61.125.421.673,75)	286.035.326.571,05

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	-	25.000.000.000,00

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Surplus/Defisit	2.283.909.513.606,00	1.282.681.772.717,66	1.001.227.740.888,34	2.250.729.615.189,78
Pembiayaan Netto	147.817.088.188,00	208.942.509.861,75	(61.125.421.673,75)	261.035.326.571,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	2.431.726.601.794,00	1.491.624.282.579,41	940.102.319.214,59	2.511.764.941.760,83

5.2 NERACA

5.2.1 Aset

Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Aset	199.602.933.340,23	202.049.081.489,47	(2.446.148.149,24)

Saldo aset tersebut terdiri atas:

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Aset Lancar	116.183.577.835,82	116.720.630.866,09	-537.053.030,27
2.	Aset Tetap	83.032.068.642,32	84.771.973.615,81	-1.739.904.973,49
3.	Aset Lainnya	418.434.487,09	556.477.007,57	-138.042.520,48
4.	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
5.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		199.634.080.965,23	202.049.081.489,47	-2.415.000.524,24

5.2.1.1 Aset Lancar

Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Aset Lancar	116.183.577.835,82	116.720.630.866,09	-537.053.030,27

Saldo aset lancar Pemerintah Kabupaten Sleman per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 terdiri atas:

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Kas dan Setara Kas	39.542.118.880,00	3.269.271.097,00	36.272.847.783,00
2.	Piutang Pajak	230.956.993.004,88	207.512.757.866,41	23.444.235.138,47
3.	Piutang Retribusi	783.027.832,00	750.766.832,00	32.261.000,00
4.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.125.001.417,68	40.786.968.493,68	-38.661.967.076,00
5.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.380.241.657,66	5.212.767.309,66	-832.525.652,00
6.	Piutang Transfer Antar Daerah	584.437.017,00	584.437.017,00	0,00
7.	Penyisihan Piutang	(163.077.997.769,00)	(142.152.366.194,20)	-20.925.631.574,80
8.	Beban Dibayar Dimuka	158.575.975,00	123.750.000,00	34.825.975,00
9.	Persediaan	731.179.820,60	632.278.444,54	98.901.376,06
Jumlah		116.183.577.835,82	116.720.630.866,09	(537.053.030,27)

5.2.1.1. a Kas dan Setara Kas

Kas dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	464.043.293,00	0,00	464.043.293,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.512.411.363,00	18.848.837,00	6.493.562.526,00
3	Kas di BLUD	3.726.799.024,00	3.250.422.260,00	476.376.764,00
4	Kas Dana Desa	28.838.865.200,00	0,00	28.838.865.200,00
Jumlah		39.542.118.880,00	3.269.271.097,00	36.272.847.783,00

5.2.1.1. a.a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Sisa UYHD	464.043.293,00	0,00	464.043.293,00
Jumlah		464.043.293,00	0,00	464.043.293,00

5.2.1.1. a.b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan namun per 30 Juni 2024 belum disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron	152.302.655,00	0,00	152.302.655,00
2.	Pajak Reklame Kain	220.500,00	0,00	220.500,00
3.	Pajak Air Tanah	91.038.135,00	0,00	91.038.135,00
4.	PBB P2	4.676.707.321,00	18.848.837,00	4.657.858.484,00
5.	BPHTB-Pemindahan Hak	1.514.631.716,00	0,00	1.514.631.716,00
6.	PBJT-Restoran	7.749.052,00	0,00	7.749.052,00
7.	PBJT-Penyediaan Jasa Boga dan Katering	59.256.303,00	0,00	59.256.303,00
8.	PBJT-Hotel	4.354.548,00	0,00	4.354.548,00
9.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	460.000,00	0,00	460.000,00
10.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	672.042,00	0,00	672.042,00
11.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	220.321,00	0,00	220.321,00
12.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	70.936,00	0,00	70.936,00
13.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	87.834,00	0,00	87.834,00
14.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.640.000,00	0,00	4.640.000,00
Jumlah		6.512.411.363,00	18.848.837,00	152.302.655,00

5.2.1.1. a.c. Kas di BLUD

Kas di BLUD per 30 Juni 2024 merupakan saldo yang terdapat pada rekening Kas BLUD.

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Jasa giro	631.064.170,00	538.503.755,00	92.560.415,00
2.	Kontribusi penguatan modal	3.087.184.854,00	2.703.293.505,00	383.891.349,00
3.	Kelebihan setor DPM	8.550.000,00	8.625.000,00	-75.000,00
Jumlah		3.726.799.024,00	3.250.422.260,00	476.376.764,00

Denda penguatan modal sebesar Rp1.178.350,00 merupakan pendapatan denda yang diterima periode bulan Januari s.d. Juni 2024 yang belum diinputkan di SKKD sampai dengan 30 Juni 2024.

5.2.1.1. b. Piutang Pajak

Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Piutang Pajak (bruto)	230.956.993.004,88	207.512.757.866,41	23.444.235.138,47
Penyisihan Piutang	-163.077.997.769,00	-142.152.366.194,20	-20.925.631.574,80
Piutang Netto	67.878.995.235,88	65.360.391.672,21	2.518.603.563,67

Piutang pajak merupakan saldo piutang pajak yang sudah ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD Kurang Bayar (SKPDKB), SKPDKB Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) namun belum dibayar oleh Wajib Pajak pada tanggal 30 Juni 2024.

Piutang bruto dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00	485.034.469,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air tanah	658.978.944,00	762.587.885,00	(103.608.941,00)
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00	149.079.000,00	(118.569.000,00)
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	48.097.500,00	132.627.750,00	(84.530.250,00)
6	Piutang PBBP2	220.996.394.330,88	194.987.153.580,88	26.009.240.750,00
7	Piutang PBJT-Restoran	4.731.356.937,00	7.621.567.992,17	(2.890.211.055,17)
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.863.224,00	17.784.964,00	7.078.260,00
9	Piutang PBJT-Hotel	3.253.882.160,00	2.512.336.640,78	741.545.519,22
10	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	187.698.290,00	251.388.250,80	(63.689.960,80)
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.694.200,00	8.487.400,00	(1.793.200,00)
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	311.244.417,00	349.270.060,00	(38.025.643,00)
13	Piutang PBJT-Pameran	1.815.273,00	288.000,00	1.527.273,00
14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran	46.974.000,00	46.974.000,00	0,00
15	Piutang PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	140.000,00	(140.000,00)
16	Piutang PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00	406.000,00	(406.000,00)
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA	172.189.260,00	186.371.899,00	(14.182.639,00)
Jumlah		230.956.993.004,88	207.512.757.891,63	23.444.235.113,25

Penyisihan piutang sebagai berikut:

No.	Jenis	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00	485.034.469,00	0,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Air tanah	658.978.944,00	72.388.323,00	586.590.621,00
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00	152.550,00	30.357.450,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	48.097.500,00	1.033.500,00	47.064.000,00
6	Piutang PBBP2	220.996.394.330,88	155.254.886.797,07	65.741.507.533,81
7	Piutang PBJT-Restoran	4.731.356.937,00	2.492.932.738,00	2.238.424.199,00
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.863.224,00	3.201.305,00	21.661.919,00
9	Piutang PBJT-Hotel	3.253.882.160,00	2.079.612.942,00	1.174.269.218,00
10	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	187.698.290,00	115.279.585,00	72.418.705,00
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.694.200,00	569.138,00	6.125.062,00
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	311.244.417,00	32.438.294,00	278.806.123,00
13	Piutang PBJT-Pameran	1.815.273,00	9.076,00	1.806.197,00
14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran	46.974.000,00	46.974.000,00	0,00
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA	172.189.260,00	165.432.510,00	6.756.750,00
Jumlah		230.956.993.004,88	160.751.205.227,07	70.205.787.777,81

5.2.1.1. b.1) Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

1. Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	485.034.469,00	100%	485.034.469,00	0,00
Jumlah		485.034.469,00		485.034.469,00	0,00

2. Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	1.260.000,00	100%	1.260.000,00	0,00
Jumlah		1.260.000,00		1.260.000,00	0,00

3. Piutang Pajak Air Tanah

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	545.970.053,00	0,50%	2.729.850,00	543.240.203,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	29.381.316,00	10%	2.938.132,00	26.443.184,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	33.814.469,00	50%	16.907.235,00	16.907.234,00
4	> 5 Tahun	49.813.106,00	100%	49.813.106,00	0,00
Jumlah		658.978.944,00		72.388.323,00	586.590.621,00

4. Piutang Pajak Pasir dan Kerikil

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	30.510.000,00	0,50%	152.550,00	30.357.450,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		30.510.000,00		152.550,00	30.357.450,00

5. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	39.750.000,00	0,50%	198.750,00	39.551.250,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	8.347.500,00	10%	834.750,00	7.512.750,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		48.097.500,00		1.033.500,00	47.064.000,00

6. Piutang PBJT-Restoran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	756.318.279,00	0,50%	3.781.591,00	752.536.688,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	1.266.972.498,00	10%	126.697.250,00	1.140.275.248,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	691.224.526,00	50%	345.612.263,00	345.612.263,00
4	> 5 Tahun	2.016.841.634,00	100%	2.016.841.634,00	0,00
Jumlah		4.731.356.937,00		2.492.932.738,00	2.238.424.199,00

7. Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	8.704.500,00	0,50%	43.523,00	8.660.977,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	14.040.769,00	10%	1.404.077,00	12.636.692,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	728.500,00	50%	364.250,00	364.250,00
4	> 5 Tahun	1.389.455,00	100%	1.389.455,00	0,00
Jumlah		24.863.224,00		3.201.305,00	21.661.919,00

8. Piutang PBJT-Hotel

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	919.092.397,00	0,50%	4.595.462,00	914.496.935,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	52.543.112,00	10%	5.254.311,00	47.288.801,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	424.966.965,00	50%	212.483.483,00	212.483.482,00
4	> 5 Tahun	1.857.279.686,00	100%	1.857.279.686,00	0,00
Jumlah		3.253.882.160,00		2.079.612.942,00	1.174.269.218,00

9. Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	65.858.465,00	0,50%	329.292,00	65.529.173,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	2.071.957,00	10%	207.196,00	1.864.761,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	10.049.542,00	50%	5.024.771,00	5.024.771,00
4	> 5 Tahun	109.718.326,00	100%	109.718.326,00	0,00
Jumlah		187.698.290,00		115.279.585,00	72.418.705,00

10. Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	1.055.600,00	0,50%	5.278,00	1.050.322,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	5.638.600,00	10%	563.860,00	5.074.740,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00
Jumlah		6.694.200,00		569.138,00	6.125.062,00

11. Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	110.772.612,00	0,50%	553.863,00	110.218.749,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	187.319.305,00	10%	18.731.931,00	168.587.374,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	13.152.500,00	100%	13.152.500,00	0,00
Jumlah		311.244.417,00		32.438.294,00	278.806.123,00

12. Piutang PBJT-Pameran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	1.815.273,00	0,50%	9.076,00	1.806.197,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00	0,00

Jumlah	1.815.273,00		9.076,00	1.806.197,00
--------	--------------	--	----------	--------------

13. Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 5 Tahun	46.974.000,00	100%	46.974.000,00	0,00
Jumlah		46.974.000,00		46.974.000,00	0,00

14. Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
2	> 1 s.d. 2 Tahun	0,00	10%	0,00	0,00
3	> 2 s.d. 5 Tahun	13.513.500,00	50%	6.756.750,00	6.756.750,00
4	> 5 Tahun	158.675.760,00	100%	158.675.760,00	0,00
Jumlah		172.189.260,00		165.432.510,00	6.756.750,00

15. Piutang PBBP2

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	<= 1 Tahun	30.840.307.377,00	0,50%	154.212.078,91	30.686.095.298,09
2	> 1 s.d. 2 Tahun	16.937.910.825,70	10%	1.693.798.060,57	15.244.112.765,13
3	> 2 s.d. 5 Tahun	39.064.181.759,18	50%	19.532.090.879,59	19.532.090.879,59
4	> 5 Tahun	133.874.785.778,00	100%	133.874.785.778,00	0,00
Jumlah		220.717.185.739,88		155.254.886.797,07	65.462.298.942,81

Ada perbedaan nilai Piutang PBB antara SIKD dan SIM PBB sebesar Rp279.208.591,00 dengan rincian sebagai berikut: Piutang PBB (SIKD) Rp220.996.394.330,88 dan Piutang PBB (SIM PBB) Rp220.717.185.739,88

Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

- 1
- Pendapatan denda PBBP2 yang masih dicatat sebagai pendapatan PBBP2 sebesar Rp261.106.882,00
- 2
- Penerimaan PBBP2 tanggal 30 Juni yg dilimpahkan ke kasda 2 Juli sebesar (Rp540.325.135,00)
- 3
- Pendapatan bunga dari BRI sebesar Rp9.662,00

5.2.1.1. b.2) Piutang Pajak Netto

Piutang pajak netto merupakan selisih dari piutang pajak dikurangi piutang pajak tidak tertagih.

5.2.1.1. c Piutang Retribusi

Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurangnya) (Rp)
Piutang Retribusi	783.027.832,00	750.766.832,00	32.261.000,00
Penyisihan Piutang	(753.841.312,00)	(717.801.832,00)	(36.039.480,00)
Piutang Netto	29.186.520,00	32.965.000,00	(3.778.480,00)

Adapun rincian per jenis piutang retribusi sebagai berikut:

No	Jenis	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	221.377.832,00	192.191.312,00	29.186.520,00
2	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	561.650.000,00	561.650.000,00	0,00
Jumlah		783.027.832,00	753.841.312,00	29.186.520,00

Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2024 terdiri dari:

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan	NVR (Rp)
1	PT. PSS tahun 2015	83.701.832,00	83.701.832,00	0,00
2	Duriyatun	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00
3	Yan Farhas	36.675.000,00	36.675.000,00	0,00
4	M Farhan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
5	Dyah Pramudita	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6	Waljid Budi Lestarianto	43.650.000,00	43.650.000,00	0,00
7	Dicky Pratama Putra (Alka Pratama)	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00
8	Adib Nur Fanani	30.665.000,00	3.066.500,00	27.598.500,00
9	Danang Ndaru Susanto	1.596.000,00	7.980,00	1.588.020,00
Jumlah		221.377.832,00	192.191.312,00	29.186.520,00

Piutang retribusi rekreasi dan olahraga Tahun 2024 terdiri dari:

No.	Uraian	Piutang Retribusi (Rp)	Penyisihan	NVR (Rp)
1	PT. PSS tahun 2015	53.350.000,00	53.350.000,00	0,00
2	Manukwari	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
3	Raja Ampat	134.200.000,00	134.200.000,00	0,00
4	Drs Wahyu Murdayat	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00
5	Stevi S Wibowo	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Jumlah		561.650.000,00	561.650.000,00	0,00

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	0 s/d 1 bulan	1.596.000,00	0,50%	7.980,00	1.588.020,00
2	>1 s/d 3 bulan	30.665.000,00	10%	3.066.500,00	27.598.500,00
3	>3 s/d 12 bulan	0,00	50%	0,00	0,00
4	> 12 bulan	750.766.832,00	100%	750.766.832,00	0,00
Jumlah		783.027.832,00		753.841.312,00	29.186.520,00

5.2.1.1. d. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.380.241.657,66	5.212.767.309,66	-832.525.652,00
Penyisihan Piutang	-1.572.152.229,93	-142.152.366.194,20	140.579.414.964,27
Piutang Netto	2.807.290.427,73	-136.939.598.884,54	139.746.889.312,27

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang sudah ditetapkan besarannya namun sampai per 30 Juni 2024 belum dilakukan pembayaran dan belum diterima di Kas Daerah. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 30 Juni 2024 terdiri dari:

No.	Uraian	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Rp)
1	Piutang Denda Pajak	3.558.295.807,66	4.499.796.739,66	-941.500.932,00
2	Piutang BLUD	821.945.850,00	712.970.570,00	108.975.280,00
Jumlah		4.380.241.657,66	5.212.767.309,66	-832.525.652,00

1.
- Piutang Denda Pajak
- Piutang Denda Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
-----	--------	--------------------	-------------------------	--------------------

1	Piutang Denda Pajak Hotel	509.602.909,00	194.513.349,61	315.089.559,39
2	Piutang Denda Pajak Restoran	986.407.440,52	197.906.337,34	788.501.103,18
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	27.516.255,60	3.648.579,60	23.867.676,00
4	Piutang Denda Pajak Parkir	5.310.347,00	8.276,32	5.302.070,68
5	Piutang Denda Pajak Air Tanah	38.333.754,82	7.253.744,22	31.080.010,60
6	Piutang Denda Pajak MBLB	22.725.740,00	194.971,70	22.530.768,30
7	Piutang Denda PBBP2	1.968.399.360,72	884.324.089,90	1.084.075.270,82
Jumlah		3.558.295.807,66	1.287.849.348,68	2.270.446.458,98

2Piutang Pendapatan BLUD

No.	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
1	Piutang Pendapatan BLUD	821.945.850,00	285.101.881,25	536.843.968,75
		821.945.850,00	285.101.881,25	536.843.968,75

Piutang Kontribusi Penguatan Modal adalah kontribusi terutang yang telah jatuh tempo pembayarannya berdasarkan perjanjian tetapi

No	SKPD	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Rp)
A.	APBD			
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	261.582.500,00	224.672.500,00	36.910.000,00
2.	Disperindag	109.634.700,00	105.907.170,00	3.727.530,00
3.	Dinas Koperasi dan UKM	57.838.250,00	53.602.500,00	4.235.750,00
4.	Dinas Pariwisata	42.375.000,00	44.125.000,00	-1.750.000,00
5.	Dinas P3A, PP dan KB	25.435.000,00	18.860.000,00	6.575.000,00
6.	Dinas Tenaga Kerja	68.605.500,00	72.927.250,00	-4.321.750,00
7.	Dinas Sosial	15.267.500,00	13.950.000,00	1.317.500,00
8.	Bagian Perekonomian	69.750.000,00	66.000.000,00	3.750.000,00
9.	PMD	159.508.000,00	100.976.750,00	58.531.250,00
	Jumlah A	809.996.450,00	701.021.170,00	50.444.030,00
B.	APBN			
1.	Disperindag	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah B	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah A + B	821.945.850,00	712.970.570,00	50.444.030,00

No	SKPD	Saldo Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
A.	APBD			
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	261.582.500,00	142.158.375,00	119.424.125,00
2.	Disperindag	109.634.700,00	34.416.900,00	75.217.800,00
3.	Dinas Koperasi dan UKM	57.838.250,00	11.794.541,25	46.043.708,75
4.	Dinas Pariwisata	42.375.000,00	5.186.875,00	37.188.125,00
5.	Dinas P3A, PP dan KB	25.435.000,00	4.944.175,00	20.490.825,00
6.	Dinas Tenaga Kerja	68.605.500,00	67.632.887,50	972.612,50
7.	Dinas Sosial	15.267.500,00	2.832.437,50	12.435.062,50
8.	Bagian Perekonomian	69.750.000,00	348.750,00	69.401.250,00
9.	PMD	159.508.000,00	3.837.540,00	155.670.460,00
	Jumlah A	809.996.450,00	273.152.481,25	536.843.968,75
B.	APBN			
1.	Disperindag	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah B	11.949.400,00	11.949.400,00	0,00
	Jumlah A + B	821.945.850,00	285.101.881,25	536.843.968,75

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang kontribusi penguatan modal adalah sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Penyisihan %	Penyisihan Piutang (Rp)	Piutang Netto (Rp)
A.	APBD				
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	75.925.000,00	0,50%	379.625,00	75.545.375,00
	> 1 s.d. 3 tahun	44.587.500,00	10%	4.458.750,00	40.128.750,00
	> 3 s.d. 5 tahun	7.500.000,00	50%	3.750.000,00	3.750.000,00
	> 5 tahun	133.570.000,00	100%	133.570.000,00	0,00
	Jumlah (1)	261.582.500,00		142.158.375,00	119.424.125,00
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	70.440.000,00	0,50%	352.200,00	70.087.800,00
	> 1 s.d. 3 tahun	5.700.000,00	10%	570.000,00	5.130.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	33.494.700,00	100%	33.494.700,00	0,00
	Jumlah (2)	109.634.700,00		34.416.900,00	75.217.800,00
3.	Dinas Koperasi dan UKM				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	31.808.250,00	0,50%	159.041,25	31.649.208,75
	> 1 s.d. 3 tahun	15.230.000,00	10%	1.523.000,00	13.707.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	1.375.000,00	50%	687.500,00	687.500,00
	> 5 tahun	9.425.000,00	100%	9.425.000,00	0,00
	Jumlah (3)	57.838.250,00		11.794.541,25	46.043.708,75
4.	Dinas Pariwisata				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	37.375.000,00	0,50%	186.875,00	37.188.125,00
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	0,00
	Jumlah (4)	42.375.000,00		5.186.875,00	37.188.125,00
5.	Dinas P3A, PP dan KB				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	13.335.000,00	0,50%	66.675,00	13.268.325,00
	> 1 s.d. 3 tahun	8.025.000,00	10%	802.500,00	7.222.500,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	4.075.000,00	100%	4.075.000,00	0,00
	Jumlah (5)	25.435.000,00		4.944.175,00	20.490.825,00
6.	Dinas Tenaga Kerja				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	977.500,00	0,50%	4.887,50	972.612,50
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	67.628.000,00	100%	67.628.000,00	0,00
	Jumlah (6)	68.605.500,00		67.632.887,50	972.612,50
7.	Dinas Sosial				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	5.487.500,00	0,50%	27.437,50	5.460.062,50
	> 1 s.d. 3 tahun	7.750.000,00	10%	775.000,00	6.975.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00

	> 5 tahun	2.030.000,00	100%	2.030.000,00	0,00
	Jumlah (7)	15.267.500,00		2.832.437,50	12.435.062,50
8.	Bagian Perekonomian				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	69.750.000,00	0,50%	348.750,00	69.401.250,00
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	0,00	100%	0,00	0,00
	Jumlah (8)	69.750.000,00		348.750,00	69.401.250,00
9.	PMD				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	127.508.000,00	0,50%	637.540,00	126.870.460,00
	> 1 s.d. 3 tahun	32.000.000,00	10%	3.200.000,00	28.800.000,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	0,00	100%	0,00	0,00
	Jumlah (8)	159.508.000,00		3.837.540,00	155.670.460,00
	Jumlah (A = 1 s.d. 9)	809.996.450,00		273.152.481,25	536.843.968,75
B.	APBN				
1.	Dinas Perindustrian, dan Perdagangan				
	Belum jatuh tempo dan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	0,00	0,50%	0,00	0,00
	> 1 s.d. 3 tahun	0,00	10%	0,00	0,00
	> 3 s.d. 5 tahun	0,00	50%	0,00	0,00
	> 5 tahun	11.949.400,00	100%	11.949.400,00	0,00
		11.949.400,00		11.949.400,00	0,00
	Jumlah (B)	11.949.400,00		11.949.400,00	0,00
	Jumlah (A + B)	821.945.850,00		285.101.881,25	536.843.968,75

5.2.1.1. Piutang Transfer Antar Daerah

No	Uraian	30-June-2024 (Rp)	31-Dec-2023 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	436.132.080,00	436.132.080,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	140.404.020,00	140.404.020,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.900.917,00	7.900.917,00
	Jumlah	584.437.017,00	584.437.017,00

5.2.1.1. Beban Dibayar Dimuka

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Dibayar Dimuka	158.575.975,00	123.750.000,00	34.825.975,00

Beban Dibayar Dimuka merupakan belanja kepada pihak ketiga yang sudah dibayarkan namun peruntukannya masih untuk beberapa waktu mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	30-June-2024 (Rp)	31-December-2023 (Rp)
1	sewa gudang masa sewa 11 Desember 2023 - 10 Desember 2024	56.250.000,00	123.750.000,00
2	sewa bangunan gudang masa sewa 1 Maret 2024 - 28 Februari 2025	50.000.000,00	0,00
3	sewa gudang masa sewa 1 Maret 2024 - 31 Juli 2024	20.000.000,00	0,00
4	sewa aplikasi whatsapp blast masa sewa 22 Mei 2024 - 22 Mei 2025	32.325.975,00	0,00
	Jumlah	158.575.975,00	123.750.000,00

5.2.1.1. I Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan disajikan di neraca sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
- Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu harga pasar yang berlaku pada saat penilaian.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama).
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
- Persediaan yang berasal dari belanja tak terduga dan sumbangan/donasi dalam keadaan darurat bencana dinilai dengan menggunakan metode harga terakhir.

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Persediaan	731.179.820,60	632.278.444,54	98.901.376,06

Nilai persediaan merupakan persediaan yang masih tersisa per 30 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sediaan	30-Jun-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
	Bahan	22.133.801,00	1.305.405,00	20.828.396,00
1	Bahan bangunan dan konstruksi	21.597.671,00	470.130,00	21.127.541,00
2	Bahan/ Bibit Tanaman	536.130,00	835.275,00	-299.145,00
	Suku Cadang	5.178.375,00	225.000,00	4.953.375,00
3	Suku Cadang Alat Angkutan	225.000,00	225.000,00	0,00
4	Suku Cadang Alat Bengkel	4.953.375,00	0,00	4.953.375,00
	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	662.618.864,60	599.481.139,54	63.137.725,06
5	Alat tulis kantor	222.056.895,60	303.701.670,00	-81.644.774,40
6	Kertas dan cover	128.690.179,00	90.488.800,00	38.201.379,00
7	Benda pos	5.260.000,00	1.980.000,00	3.280.000,00
8	Bahan komputer	157.821.353,00	83.498.538,54	74.322.814,46
9	Perabot kantor	124.987.148,00	110.216.071,00	14.771.077,00
10	Alat listrik	18.714.789,00	1.431.060,00	17.283.729,00
11	Perlengkapan dinas	325.000,00	325.000,00	0,00
12	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	4.763.500,00	7.840.000,00	-3.076.500,00
	Obat-obatan	1.587.300,00	2.015.900,00	-428.600,00
13	Obat	1.587.300,00	2.015.900,00	-428.600,00
	Persediaan untuk dijual/diserahkan	39.661.480,00	29.251.000,00	10.410.480,00
14	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	39.661.480,00	29.251.000,00	10.410.480,00
	Jumlah	731.179.820,60	632.278.444,54	98.901.376,06

5.2.1.2 Aset Tetap

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Aset Tetap	83.032.068.642,32	84.771.973.615,81	(1.739.904.973,49)
Jumlah	83.032.068.642,32	84.771.973.615,81	(1.739.904.973,49)

Pada tahun 2024 Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp83.032.068.642,32, mengalami penurunan Rp1.739.904.973,49 atau 2,05% dari nilai aset tetap tahun 2023 yaitu sebesar Rp84.771.973.615,81

- Aset tetap tersebut telah dilakukan penyusutan.
- Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi masa manfaat.
- Kebijakan aset tetap tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Nilai aset tetap yang dimiliki per tanggal 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2024	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Peralatan & Mesin	19.053.874.394,61	18.469.634.036,75	584.240.357,86
2.	Gedung & Bangunan	129.919.585.857,00	129.884.173.657,00	35.412.200,00
3.	Jalan, Irigasi & Jaringan	223.751.360,00	223.751.360,00	0,00
4.	Aset Tetap Lainnya	44.078.000,00	44.078.000,00	0,00
5.	Akumulasi Penyusutan	(66.363.188.736,79)	(63.988.812.705,44)	(2.374.376.031,35)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	153.967.767,50	139.149.267,50	14.818.500,00
	Jumlah	83.032.068.642,32	84.771.973.615,81	(1.739.904.973,49)

Penambahan dan penarikan aset tetap pada tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
	Pengadaan Sendiri	182.147.155,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.237.500,00
2	Komputer	52.678.955,00
3	Bangunan Gedung	35.412.200,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.818.500,00
	Dropping	630.395.402,86
1	Alat Angkutan	167.350.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	362.895.702,86
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.765.000,00
4	Komputer	54.439.700,00
5	Peralatan Olah Raga	43.945.000,00
	Penarikan	176.271.500,00
1	Alat Angkutan	162.934.500,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	3.690.000,00
3	Komputer	9.647.000,00
	Usul Hapus (Aset Rusak Berat)	1.800.000,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.800.000,00

Rincian mutasi aset tetap selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	18.469.634.036,75	762.311.857,86	178.071.500,00	19.053.874.394,61
1	Alat-alat Besar	761.440.500,00	0,00	0,00	761.440.500,00
2	Alat-alat Angkutan	3.088.637.206,00	167.350.000,00	162.934.500,00	3.093.052.706,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.984.000,00	0,00	0,00	181.984.000,00
4	Alat Pertanian	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.444.472.693,50	442.133.202,86	5.490.000,00	6.881.115.896,36
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	299.181.235,00	1.765.000,00	0,00	300.946.235,00
7	Alat Laboratorium	275.181.900,00	0,00	0,00	275.181.900,00
8	Alat-alat Persenjataan/	13.965.000,00	0,00	0,00	13.965.000,00
9	Komputer	6.898.244.852,25	107.118.655,00	9.647.000,00	6.995.716.507,25
10	Rambu-rambu lalu lintas darat	6.660.000,00	0,00	0,00	6.660.000,00
11	Alat Olah Raga Lainnya	495.616.650,00	43.945.000,00	0,00	539.561.650,00
	Gedung dan Bangunan	129.884.173.657,00	35.412.200,00	0,00	129.919.585.857,00
12	Bangunan Gedung	129.884.173.657,00	35.412.200,00	0,00	129.919.585.857,00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.751.360,00	0,00	0,00	223.751.360,00
13	Bangunan Air/Irigasi	101.519.360,00	0,00	0,00	101.519.360,00
14	Instalasi	19.965.000,00	0,00	0,00	19.965.000,00
15	Jaringan	102.267.000,00	0,00	0,00	102.267.000,00
	Aset Tetap Lainnya	44.078.000,00	0,00	0,00	44.078.000,00
16	Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Alat Olah Raga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	44.078.000,00	0,00	0,00	44.078.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.149.267,50	14.818.500,00	0,00	153.967.767,50
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.149.267,50	14.818.500,00	0,00	153.967.767,50
Total		148.760.786.321,25	812.542.557,86	178.071.500,00	149.395.257.379,11

Hasil perhitungan penyusutan aset tetap tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Peralatan dan Mesin	19.053.874.394,61	-16.027.451.407,91	3.026.422.986,70
1	Alat-alat Besar	761.440.500,00	-744.483.476,19	16.957.023,81
2	Alat-alat Angkutan	3.093.052.706,00	-2.339.436.250,46	753.616.455,54
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	181.984.000,00	-150.638.691,67	31.345.308,33
4	Alat Pertanian	4.250.000,00	-2.581.250,00	1.668.750,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.881.115.896,36	-5.624.636.799,66	1.256.479.096,70
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	300.946.235,00	-209.227.301,92	91.718.933,08
7	Alat Laboratorium	275.181.900,00	-260.437.108,33	14.744.791,67
8	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	13.965.000,00	-13.933.750,00	31.250,00
9	Komputer	6.995.716.507,25	-6.148.397.251,90	847.319.255,35
10	Rambu-rambu lalu lintas darat lainnya	6.660.000,00	-122.100,00	6.537.900,00
11	Alat Olah Raga Lainnya	539.561.650,00	-533.557.427,78	6.004.222,22
	Gedung dan Bangunan	129.919.585.857,00	-50.285.351.124,79	79.634.234.732,21
1	Bangunan Gedung	129.919.585.857,00	-50.285.351.124,79	79.634.234.732,21
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	223.751.360,00	-50.386.204,18	173.365.155,82
1	Bangunan Air/Irigasi	101.519.360,00	-10.442.454,15	91.076.905,85
2	Instalasi	19.965.000,00	-4.325.749,98	15.639.250,02
3	Jaringan	102.267.000,00	-35.618.000,05	66.648.999,95
	Aset Tetap Lainnya	44.078.000,00	0,00	44.078.000,00
1	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
2	Hewan dan Ternak serta Tanaman	44.078.000,00	0,00	44.078.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	153.967.767,50	0,00	153.967.767,50
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	153.967.767,50	0,00	153.967.767,50
	Jumlah	149.395.257.379,11	-66.363.188.736,88	83.032.068.642,23

5.2.1.2 a Peralatan Dan Mesin

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Peralatan dan Mesin	19.053.874.394,61	18.469.634.036,75	584.240.357,86

- Kebijakan akuntansi peralatan dan mesin sebagai berikut:
- Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan harga perolehan yaitu harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka peralatan dan mesin disajikan dengan menggunakan nilai wajar.
 - Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap.
 - Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - Menambah fungsi;
 - Mengubah fungsi; atau
 - Menambah asesoris/komponen peralatan.

Atas nilai peralatan dan mesin dapat diungkap sebagai berikut.

1) Penambahan peralatan dan mesin pada Tahun 2024 adalah yang berasal dari sumber berikut:

a) Penambahan peralatan dan mesin dari pengadaan sendiri yang terdiri dari:

No.	Uraian	Harga (Rp)	Keterangan
1	Alat Rumah Tangga		
	Meubelair	5.161.500,00	
	Alat Pendingin	74.076.000,00	
	Jumlah	79.237.500,00	
2	Komputer Unit		
	Personal Computer	9.990.000,00	
	Jumlah	9.990.000,00	
3	Peralatan Komputer		
	Peralatan Personal Komputer	42.688.955,00	
	Jumlah	42.688.955,00	
	Jumlah	131.916.455,00	

b) Penambahan peralatan dan mesin dari dropping yang terdiri dari:

No.	Uraian	Harga (Rp)	Keterangan
1	Alat Angkutan		
	Kendaraan Bermotor Penumpang	153.600.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.750.000,00	
	Jumlah	167.350.000,00	
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Kantor Lainnya	229.550.000,00	
	Jumlah	229.550.000,00	
3	Alat Rumah Tangga		
	Meubelair	9.463.702,86	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.500.000,00	
	Jumlah	109.963.702,86	
4	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
	Kursi Kerja Pejabat	19.582.000,00	
	Lemari dan Arsip Pejabat	3.800.000,00	
	Jumlah	23.382.000,00	
5	Alat Studio		
	Peralatan Studio Video dan Film	1.765.000,00	
	Jumlah	1.765.000,00	
6	Komputer Unit		
	Personal Computer	47.169.500,00	
	Jumlah	47.169.500,00	
7	Peralatan Komputer		
	Peralatan Personal Komputer	7.270.200,00	
	Jumlah	7.270.200,00	
8	Peralatan Olahraga		
	Peralatan Olahraga lainnya	43.945.000,00	
	Jumlah	43.945.000,00	
	Jumlah	630.395.402,86	

2) Pengurangan peralatan dan mesin pada Tahun 2024 adalah yang berasal dari sumber berikut:

a) pengurangan peralatan dan mesin karena usul hapus (rusak berat) yang terdiri dari:

No.	Uraian	Harga (Rp)	Keterangan
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	
	Jumlah	1.800.000,00	
	Jumlah	1.800.000,00	

b) pengurangan peralatan dan mesin karena diserahkan ke SKPKD (penarikan) yang terdiri dari:

No.	Uraian	Harga (Rp)	Keterangan
1	Alat Angkutan		
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	129.300.000,00	
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.634.500,00	
	Jumlah	162.934.500,00	
2	Alat Rumah Tangga		
	Meubelair	3.690.000,00	
	Jumlah	3.690.000,00	
3	Komputer Unit		
	Personal Computer	9.647.000,00	
	Jumlah	9.647.000,00	
	Jumlah	176.271.500,00	

5.2.1.2 b Gedung dan Bangunan

No	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	129.919.585.857,00	129.884.173.657,00	35.412.200,00

Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No	Uraian	Per 30 Juni 2024 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	129.919.585.857,00
	Bangunan Gedung Kantor	10.899.046.600,00
	Bangunan Gudang	183.215.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	118.080.600.907,00
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	213.754.600,00
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	54.386.000,00
	Bangunan Gedung Garasi/Pool	70.500.000,00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	418.082.750,00
	Jumlah	129.919.585.857,00

Penambahan gedung dan bangunan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

NO.	Uraian	Keterangan	Harga (Rp)
	Bangunan Gedung		
1	Bangunan Gedung Kantor	Penambahan dari pengadaan sendiri	35.412.200,00
Jumlah			35.412.200,00

5.2.1.2 c Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

No.	Uraian	30 Juni 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Bangunan Air/Irigasi	49.583.600,00	49.583.600,00	0,00
2	Bangunan Air Bersih/Air Baku	23.310.460,00	23.310.460,00	0,00
3	Bangunan Air Kotor	28.625.300,00	28.625.300,00	0,00
4	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lain	19.965.000,00	19.965.000,00	0,00
5	Jaringan Cabang Distribusi	78.617.000,00	78.617.000,00	0,00
6	Jaringan Telepon	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00
Jumlah		223.751.360,00	223.751.360,00	0,00

Mutasi jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
1	Bangunan Air/Irigasi	101.519.360,00	0,00	0,00	101.519.360,00
2	Instalasi	19.965.000,00	0,00	0,00	19.965.000,00
3	Jaringan	102.267.000,00	0,00	0,00	102.267.000,00
Jumlah		223.751.360,00	0,00	0,00	223.751.360,00

5.2.1.2 d Aset Tetap Lainnya

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
Aset Tetap Lainnya	44.078.000,00	44.078.000,00	0,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Hewan dan Ternak serta Tanaman			
	Taman Perkebunan Lain-lain	44.078.000,00	44.078.000,00	0,00
	Jumlah	44.078.000,00	44.078.000,00	0,00
Jumlah		44.078.000,00	44.078.000,00	0,00

Mutasi aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
1	Hewan dan Ternak serta Tanaman	44.078.000,00	0,00	0,00	44.078.000,00
Jumlah		44.078.000,00	0,00	0,00	44.078.000,00

5.2.1.2 e Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31-Des-2023 (Rp)	30-Juni 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
Konstruksi dalam pengerjaan	139.149.267,50	153.967.767,50	14.818.500,00

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan	Harga
1	Konstruksi dalam pengerjaan	Pengadaan sendiri (Denah Layout Dafda)	14.818.500,00
Jumlah			14.818.500,00

5.2.1.2 f Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	30 Juni 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan		-63.988.812.705,44	-2.546.326.531,35	-171.950.500,00	-66.363.188.736,79
1	Peralatan dan Mesin	-14.944.762.276,33	-1.254.639.631,51	-171.950.500,00	-16.027.451.407,84
2	Gedung dan Bangunan	-48.997.043.541,28	-1.288.307.583,50	0,00	-50.285.351.124,78
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-47.006.887,83	-3.379.316,34	0,00	-50.386.204,17

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

a.	Beban Penyusutan			
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		637.683.411,98	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.288.307.583,50	
	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.379.316,34	
				1.929.370.311,82
b.	Dropping			
	Peralatan dan Mesin		616.956.219,53	
				616.956.219,53
	Jumlah Penambahan Akumulasi Penyusutan			2.546.326.531,35

Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebagai berikut:

a.	Usul apus aset tetap			
	Peralatan dan Mesin		1.800.000,00	
				1.800.000,00
b.	Penarikan			
	Peralatan dan Mesin		170.150.500,00	
				170.150.500,00
				171.950.500,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-744.483.476,19
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-2.339.436.250,48
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-150.638.691,63
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-2.581.250,01
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-5.624.636.799,62
6	Akumulasi Penyusutan Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	-209.227.301,88
7	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-260.437.108,31
8	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-13.933.750,02
9	Akumulasi Penyusutan Komputer	-6.148.397.251,91
10	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-122.100,00
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-533.557.427,77
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-50.285.351.124,79
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-10.442.454,15
14	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-4.325.749,98
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-35.618.000,05
Jumlah		-66.363.188.736,79

Akumulasi penyusutan dihitung dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa,dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	ASET TETAP	
	Peralatan dan Mesin	
1.	Alat-Alat Besar Darat	9
2.	Alat-Alat Besar Apung	7

3.	Alat-alat Bantu	6
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6
5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1
6.	Alat Angkut Apung Bermotor	9
7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2
8.	Alat Angkut Bermotor Udara	19
9.	Alat Bengkel Bermesin	9
10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	4
11.	Alat Ukur	4
12.	Alat Pengolahan Pertanian	3
13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	3
14.	Alat Kantor	4
15.	Alat Rumah Tangga	4
16.	Peralatan Komputer	3
17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4
18.	Alat Studio	4
19.	Alat Komunikasi	4
20.	Peralatan Pemancar	9
21.	Alat Kedokteran	4
22.	Alat Kesehatan	4
23.	Unit-Unit Laboratorium	7
24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	9
25.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	14
26.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	14
27.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9
28.	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	9
29.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	6
30.	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	14
31.	Senjata Api	9
32.	Persenjataan Non Senjata Api	2
33.	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
Gedung dan Bangunan		
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	49
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	49
3.	Bangunan Menara	39
4.	Bangunan Bersejarah	49
5.	Tugu Peringatan	49
6.	Candi	49
7.	Monumen/Bangunan Bersejarah	49
8.	Tugu Peringatan Lain	49
9.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	49
10.	Rambu-Rambu	49
11.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	49
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
1.	Jalan	9
2.	Jembatan	49
3.	Bangunan Air Irigasi	49
4.	Bangunan Air Pasang Surut	49
5.	Bangunan Air Rawa	24
6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	9
7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9
8.	Bangunan Air Bersih/Baku	39
9.	Bangunan Air Kotor	39
10.	Bangunan Air	39
11.	Instalasi Air Minum/Air Bersih	29
12.	Instalasi Air Kotor	29
13.	Instalasi Pengolahan Sampah	9
14.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	9
15.	Instalasi Pembangkit Listrik	39
16.	Instalasi Gardu Listrik	39
17.	Instalasi Pertahanan	29
18.	Instalasi Gas	29
19.	Instalasi Pengaman	19
20.	Jaringan Air Minum	29
21.	Jaringan Listrik	39
22.	Jaringan Telepon	19
23.	Jaringan Gas	29

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya terdiri dari :

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Pengurangan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	3.568.310.000,00	4.321.569.383,00	-753.259.383,00
	- Software	3.568.310.000,00	4.321.569.383,00	-753.259.383,00
2	Aset Lain- lain	2.982.280.407,52	2.891.469.587,93	90.810.819,59
	- Aset lain-lain/Barang Rusak	2.982.280.407,52	2.891.469.587,93	90.810.819,59
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-3.188.569.016,11	-3.802.309.376,96	613.740.360,85
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-2.943.586.904,32	-2.854.252.586,40	-89.334.317,92
JUMLAH		418.434.487,09	556.477.007,57	-138.042.520,48

5.2.1.3 a Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud merupakan nilai perolehan untuk pengadaan Aset Tak Berwujud yang terdiri dari software dan kajian. Atas nilai software tersebut telah dilakukan penghitungan amortisasi. Adapun rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Software (Rp)	Akumulasi Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Oracle database di bidang penetapan	65.175.000,00	65.175.000,00	0,00
2	Modul Sim Gaji	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
3	Software Inventarisasi Bidang Aset	46.970.000,00	46.970.000,00	0,00
4	Software Bridging Virtual Account (Bidang Penagihan)	47.362.000,00	33.942.766,67	13.419.233,33
5	Modul E-Surat Kab Sleman Bidang Anggaran	10.000.000,00	6.333.333,33	3.666.666,67
6	Modal Software Sim PBB Bid Penagihan	44.400.000,00	14.060.000,00	30.340.000,00
7	software sensus BMD	52.170.000,00	16.520.500,00	35.649.500,00
8	SIG Aset Kab. Sleman tahun 2022	44.500.000,00	14.091.666,67	30.408.333,33
9	Software Sistem Informasi Manajemen SIM PBB secara online	236.920.000,00	236.920.000,00	0,00
10	Sim DPM	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
11	Reklasifikasi dari modal BLUD (pengadaan SIADPM) UPT PDPM	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00
12	Website DPKAD	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00
13	Sistem Informasi Manajemen Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018	99.750.000,00	99.750.000,00	0,00
14	SIMAKDA/SIADINDA	1.264.250.000,00	1.264.250.000,00	0,00
15	software penatausahaan piutang pajak daerah	43.734.000,00	8.746.800,00	34.987.200,00
16	SIM ASET	247.148.500,00	247.148.500,00	0,00
17	SIM PERSEDIAAN	244.080.000,00	244.080.000,00	0,00
18	Software Modul Aplikasi SISMOIP	43.512.000,00	5.076.400,00	38.435.600,00
19	modul menu laporan dana keistimewaan di SIKD (Bid Perbendaharaan)	132.965.000,00	68.331.149,42	64.633.850,58
20	Belanja modal Software Informasi Manajemen BPHTB Bidang	458.312.000,00	458.312.000,00	0,00
21	belanja modal Software SIMPAD (Bidang Dafda)	320.501.500,00	192.300.900,00	128.200.600,00
Jumlah		3.568.310.000,00	3.188.569.016,09	379.740.983,91

5.2.1.3 b Aset Lain-Lain

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Selisih
Aset Lain-Lain/Barang Rusak	2.982.280.407,50	2.891.469.587,93	90.810.819,57
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-2.943.586.904,32	-2.854.252.586,40	-89.334.317,92
Nilai Buku	38.693.503,18	37.217.001,53	1.476.501,65

Mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	Bertambah	Berkurang	30 Juni 2024
Aset Lain-lain/Barang Rusak	2.891.469.587,93	842.638.383,00	751.827.563,41	2.982.280.407,52

Aset lain-lain/barang rusak tersebut, dengan nilai akumulasi penyusutan yang merupakan akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang direklas ke aset lain-lain karena sudah rusak atau tidak digunakan. Aset lain-lain tidak diperhitungkan beban penyusutannya.

Penambahan Aset Rusak Berat/Usang dikarenakan adanya:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Reklas dari aset tak berwujud-software karena usul hapus	840.838.383,00
2	Reklas dari aset tetap karena usul hapus	1.800.000,00
	Jumlah	842.638.383,00

Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang dikarenakan adanya:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan aset rusak berat (penghapusan)	751.827.563,41
	Jumlah	751.827.563,41

Aset tetap dan aset lainnya dalam neraca tahun 2024 tidak termasuk aset ekstrakomtabel yang merupakan aset tetap yang nilainya dibawah batas minimum kapitalisasi. Adapun rincian aset ekstrakomtabel per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Aset ekstrakomtabel per 30 Juni 2024 sebesar Rp346.309.076,44

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Peralatan dan Mesin			
1	Perkakas Bengkel Kerja	1	75.000,00	75.000,00
2	Peralatan Tukang Kayu	14	1.400.000,00	1.400.000,00
3	Alat Pengolah Tanah dan Bangunan	7	943.000,00	943.000,00
4	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4	488.571,44	488.571,44
5	Alat Kantor Lainnya	81	18.250.000,00	18.250.000,00
6	Meubelair	399	107.495.300,00	107.495.300,00
7	Alat Dapur	2	479.000,00	479.000,00
8	Alat Rumah Tangga Lainnya	11	1.270.525,00	1.270.525,00
9	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6	1.687.500,00	1.687.500,00
10	Alat Komunikasi Telephone	3	750.000,00	750.000,00
11	Alat Keamanan	3	141.000,00	141.000,00
12	Alat Penolong	9	693.000,00	693.000,00
13	Alat Pendukung Pencarian	20	2.450.000,00	2.450.000,00
14	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	12	3.330.000,00	3.330.000,00
15	Peralatan Permainan	6	925.700,00	925.700,00
	Gedung dan Bangunan			
16	Bangunan Gedung Kantor	20	58.859.900,00	58.859.900,00
17	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	13	73.036.700,00	73.036.700,00
18	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	2	27.259.540,00	27.259.540,00
19	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	19.468.290,00	19.468.290,00
	Aset Lain-Lain			
20	Aset Lain-Lain	135	27.306.050,00	27.306.050,00
	Jumlah	749,00	346.309.076,44	346.309.076,44

5.2.2 KEWAJIBAN

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Kewajiban	718.346.739,16	736.803.300,02	-18.456.560,86

Rincian Kewajiban per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No.	Kewajiban	30 Juni 2024 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	718.346.739,16	736.803.300,02	(18.456.560,86)
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	718.346.739,16	736.803.300,02	(18.456.560,86)

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2024 terdiri atas:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	689.796.739,16	728.178.300,02	(38.381.560,86)
6	Utang Belanja	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	8.550.000,00	8.625.000,00	(75.000,00)
	Jumlah	718.346.739,16	736.803.300,02	(18.456.560,86)

5.2.2.1 a Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024.

5.2.2.1 b Utang Bunga

Tidak ada Utang Bunga pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024.

5.2.2.1 c Utang Pinjaman Jangka Pendek

Tidak ada Utang Pinjaman Jangka Pendek pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024.

5.2.2.1 d Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Tidak ada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024.

5.2.2.1 e Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	689.796.739,16	728.178.300,02	(38.381.560,86)

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di tahun anggaran 2024 namun belum merupakan hak karena pendapatan tersebut untuk perioda mendatang. Rincian dari pendapatan diterima dimuka yaitu:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Penambahan (Pengurangan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sewa Lahan/ Bangunan Stadion Maguwoharjo Sleman untuk	35.000.000,00	50.000.000,00	(15.000.000,00)
2	Sewa Tempat untuk ATM BPD	2.700.000,00	4.500.000,00	(1.800.000,00)
3	Sewa Ruang untuk Pelayanan Bank BPD Cabang Sleman	4.166.666,66	29.166.666,66	(25.000.000,00)
4	Sewa Gedung Eks. SDN 1 Protojayan (KB Aisyiyah Prambanan)	225.000,00	375.000,00	(150.000,00)
5	Latihan Akreditasi Mengemudi (Ida Rachmawati/ Anom Suhandoro)	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
6	Sewa Kios Foodcourt GOR Klebengan atas nama Panut / Sugeng	0,00	15.950.000,00	(15.950.000,00)
7	Sewa food court GOR Klebengan a.n Eko Budi Santoso	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)
8	Sewa food court GOR Klebengan a.n Eko Budi Santoso dkk	47.125.000,00	0,00	47.125.000,00
9	Sewa GOR Klebengan berupa ruangan sisi Barat gedung indoor	0,00	4.450.000,00	(4.450.000,00)
10	BLUD	84.859.000,00	51.932.500,00	32.926.500,00
11	Sewa menyewa lahan milik pemerintah kabupaten sleman untuk	0,00	1.714.950,00	(1.714.950,00)
12	PT. MAC Sarana Djaya Sewa Menyewa Lahan Milik Pemerintah	173.745.833,41	201.920.833,39	(28.174.999,98)
13	Koperasi Aman/PT BPR Syariah Sleman/ Sehat Sentosa	4.820.833,33	33.745.833,33	(28.925.000,00)
14	Sewa GOR Klebengan Kios FoodCourt atas nama Surono (Uma	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)
15	Sewa Gor Klebengan kios food court nomor 7 atas nama Titik	725.000,00	2.900.000,00	(2.175.000,00)
16	Sewa Menyewa Lahan Milik Pemerintah Kabupaten Sleman untuk	2.180.250,00	2.524.500,00	(344.250,00)
17	Sewa GOR Klebengan Kios No. 1 The Rice Cup atas nama Johny	4.533.333,34	1.133.333,32	3.400.000,02
18	Sewa Ruang Usaha GOR Klebengan Kios No. 2 Sri Dewi Syamsuri	4.533.333,32	1.133.333,34	3.399.999,98
19	Sewa GOR Klebengan Kios No. 3 Praktek Dokter Hewan Bima Ari	4.533.333,32	1.133.333,34	3.399.999,98
20	Sewa GOR Klebengan Kios No. 4 Icsan Tawaqal	4.533.333,32	1.133.333,34	3.399.999,98
21	Sewa GOR Klebengan Kios No.5 atas nama SUGOHI (	9.483.333,30	2.370.833,30	7.112.500,00
22	Sewa Ruang Usaha Lahan Area Parkir Sebelah Barat atas nama	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00
23	Sewa Telekomunikasi di Rusunawa Dabag Condongcatur PT.MAC	244.078.750,00	278.136.250,00	(34.057.500,00)
24	Sewa Bangunan Pemkab Sleman Jl. Affandi. SD Deresan dr. Raudi	25.886.702,50	0,00	25.886.702,50
25	Sewa Tanah Untuk Floating Resto atas nama HM Nur Zubaedy /PT	7.567.325,00	0,00	7.567.325,00
26	Sewa GOR Klebengan kios nomor 8 atas nama Imam Fuji Raharjo	4.533.333,33	1.400.000,00	3.133.333,33
27	Sewa lahan parkir milik pemerintah kabupaten sleman pengelola	378.833,33	2.651.833,33	(2.273.000,00)
28	Sewa foodcourt GOR Klebengan a.n. Dwijo Kriswanto	0,00	2.175.000,00	(2.175.000,00)
29	Sewa lahan milik pemkab sleman gedung bapelkes atas nama Heri	0,00	19.612.850,02	(19.612.850,02)
30	sewa lahan pemkab sleman kelompok ekonomi petani PANUNTUN	1.745.416,67	12.217.916,65	(10.472.499,98)
31	GOR Klebengan Kios No.1 utk usaha SEBLAK BLOOM a.n. Bima	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
32	GOR pangukan Selter No. 1 a.n. Rizqianto H	488.795,00	0,00	488.795,00
33	Gor Klebengan Ruang Usaha Kios Nomor 6 atas nama Dyah	6.233.333,33	0,00	6.233.333,33
	Jumlah	689.796.739,16	728.178.300,02	(38.381.560,86)

f Utang Belanja

Uraian	30 Juni 2024	31-Des-2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Utang Belanja	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Utang belanja merupakan belanja yang masih harus dibayar per tanggal 30 Juni 2024. Utang belanja tersebut meliouti:

No.	Jenis Utang	30 Juni 2024	31-Des-2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Jumlah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

g Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	30 Juni 2024	31-Des-2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.550.000,00	8.625.000,00	(75.000,00)
Jumlah	8.550.000,00	8.625.000,00	(75.000,00)

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp8.550.000,00 merupakan kelebihan setor dari penerima Dana Penguatan Modal (DPM) pada UPTD Pengelolaan Dana Penguatan (PDPM) dan akan dikembalikan pada tahun 2024.

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak ada Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2024.

5.2.3 EKUITAS

5.2.3.1 Ekuitas

Uraian	30 Juni 2024	31-Des-2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Ekuitas	198.915.734.226,07	201.312.278.189,45	(2.396.543.963,38)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah per tanggal 30 Juni 2024. Komponen ekuitas terdiri atas Ekuitas Awal, Surplus Defisit LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni 2024 yang tersaji pada catatan atas laporan keuangan Bab V.

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Pengakuan pendapatan maupun beban dalam LO menggunakan basis akrual.

5.3.1 Pendapatan – LO

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan - LO	1.513.563.894.691,34	2.857.688.725.738,47	(1.344.124.831.047,13)

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan – LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD atau realisasi penerimaan kas di kasda, tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD atau penerimaan yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

Rincian realisasi Pendapatan - LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	475.042.075.319,34	906.381.074.607,59	-431.338.999.288,25
2	Pendapatan transfer - LO	1.034.430.366.099,00	1.941.783.001.325,88	-907.352.635.226,88
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	-5.433.196.532,00
	Jumlah	1.513.563.894.691,34	2.857.688.725.738,47	(1.344.124.831.047,13)

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah - LO	475.042.075.319,34	906.381.074.607,59	(431.338.999.288,25)

Pendapatan Asli Daerah per 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	465.762.255.559,00	841.410.638.732,17	-375.648.383.173,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah	975.002.655,86	3.153.866.371,24	-2.178.863.715,38
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	39.886.968.493,68	-39.886.968.493,68
4	Lain-lain PAD yang Sah	8.304.817.104,48	21.929.601.010,50	-13.624.783.906,02
Jumlah		475.042.075.319,34	906.381.074.607,59	-431.338.999.288,25

5.3.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	465.762.255.559,00	841.410.638.732,17	-375.648.383.173,17

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya. Berikut rincian penerimaan pendapatan pajak daerah berdasarkan jenis transaksi selama Tahun 2024

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	PBJT-JASA PERHOTELAN-LO	79.837.320.181,00	158.420.113.605,47	-78.582.793.424,47
	Hotel - LO	0,00	154.736.896.099,10	-154.736.896.099,10
	Rumah Penginapan dan sejenisnya	0,00	2.142.389.605,37	-2.142.389.605,37
	Rumah Kos Dengan Jumlah Kamar Lebih Dari 10 (Sepuluh) - LO	0,00	1.540.827.901,00	-1.540.827.901,00
	PBJT-Hotel LO	77.961.738.322,00	0,00	77.961.738.322,00
	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO	1.875.581.859,00	0,00	1.875.581.859,00
2.	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN-LO	87.721.336.143,00	169.681.542.521,00	-81.960.206.378,00
	Restoran - LO	0,00	138.542.153.337,00	-138.542.153.337,00
	Kafetaria - LO	0,00	17.930.150.819,00	-17.930.150.819,00
	Jasa Boga/ Katering - LO	0,00	13.209.238.365,00	-13.209.238.365,00
	PBJT- Restoran -LO	82.005.312.988,00	0,00	82.005.312.988,00
	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	5.716.023.155,00	0,00	5.716.023.155,00
3.	PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN-LO	10.422.754.458,00	19.815.622.114,00	-9.392.867.656,00
	Tontonan Film/Bioskop - LO	0,00	7.784.813.738,00	-7.784.813.738,00
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	0,00	2.852.026.074,00	-2.852.026.074,00
	Pameran - LO	0,00	1.096.312.561,00	-1.096.312.561,00
	Diskotik, Karaoke, Klab Malam Dan Sejenisnya - LO	0,00	922.619.504,00	-922.619.504,00
	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	0,00	4.687.296.796,00	-4.687.296.796,00
	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa Dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) - LO	0,00	1.662.477.373,00	-1.662.477.373,00
	Pertandingan Olahraga - LO	0,00	810.076.068,00	-810.076.068,00
	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu -LO	4.642.895.269,00	0,00	4.642.895.269,00
	PBJT-Pergelaran Kesenian,MUSIK,Tari, dan/atau Busana-LO	813.518.990,00	0,00	813.518.990,00
	PBJT-Pameran-LO	557.020.869,00	0,00	557.020.869,00
	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	2.904.833.737,00	0,00	2.904.833.737,00
	PBJT-Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran-LO	402.067.650,00	0,00	402.067.650,00
	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	408.886.675,00	0,00	408.886.675,00
	PBJT-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	693.531.268,00	0,00	693.531.268,00
4.	PAJAK REKLAME - LO	5.887.870.148,00	12.240.938.007,00	6.353.067.859,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	5.669.446.320,00	11.666.708.542,00	5.997.262.222,00
	Pajak Reklame Kain - LO	173.651.702,00	533.014.860,00	359.363.158,00
	Pajak Reklame Berjalan - LO	44.772.126,00	41.214.605,00	-3.557.521,00
5.	PBJT-TENAGA LISTRIK-LO	71.540.313.034,00	128.722.488.917,00	-57.182.175.883,00
	PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	71.540.313.034,00	128.722.488.917,00	-57.182.175.883,00
6.	PBJT-JASA PARKIR - LO	2.042.036.845,00	5.953.045.283,00	-3.911.008.438,00
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir - LO	2.042.036.845,00	5.953.045.283,00	-3.911.008.438,00
7.	PAJAK AIR TANAH - LO	4.254.528.764,00	9.552.792.110,00	-5.298.263.346,00
	Pajak Air Tanah - LO	4.254.528.764,00	9.552.792.110,00	-5.298.263.346,00
8.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - LO	864.386.750,00	3.668.433.525,00	-2.804.046.775,00
	Pajak Pasir Dan Kerikil - LO	86.013.000,00	841.496.225,00	-755.483.225,00
	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Lainnya - LO	778.373.750,00	2.826.937.300,00	-2.048.563.550,00
9.	PBBP2-LO	92.105.317.917,00	88.135.004.198,70	3.970.313.718,30
	PBBP2-LO	92.105.317.917,00	88.135.004.198,70	3.970.313.718,30
10.	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) - LO	111.086.391.319,00	245.220.658.451,00	-134.134.267.132,00
	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	106.684.679.667,00	233.988.501.616,00	-127.303.821.949,00
	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	4.401.711.652,00	11.232.156.835,00	-6.830.445.183,00
Jumlah		465.762.255.559,00	841.410.638.732,17	-375.648.383.173,17

Dalam jumlah realisasi Pendapatan Pajak - LO tersebut diatas termasuk pendapatan pajak per 30 Juni 2024 yang berupa piutang pajak dengan rincian sebagi berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	485.034.469,00
2	Piutang Pajak Reklame Kain	1.260.000,00
3	Piutang Pajak Air tanah	658.978.944,00
4	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	30.510.000,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	48.097.500,00
6	Piutang PBBP2	220.996.394.330,88
7	Piutang PBJT-Restoran	4.731.356.937,00
8	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.863.224,00
9	Piutang PBJT-Hotel	3.253.882.160,00
10	Piutang PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	187.698.290,00
11	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.694.200,00
12	Piutang PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	311.244.417,00
13	Piutang PBJT-Pameran	1.815.273,00
14	Piutang PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk OR dan Kebugaran	46.974.000,00
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/SPA	172.189.260,00
Jumlah		230.956.993.004,88

5.3.1.1 2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	975.002.655,86	3.153.866.371,24	-2.178.863.715,38

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya. Realisasi penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah dapat dirinci berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	623.967.655,86	1.303.540.631,24	-679.572.975,38
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	449.074.900,86	1.303.540.631,24	-854.465.730,38
	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	30.946.850,00	0,00	30.946.850,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	131.335.905,00	0,00	131.335.905,00
	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	10.960.000,00	0,00	10.960.000,00
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	351.035.000,00	1.850.325.740,00	-1.499.290.740,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi - LO	351.035.000,00	1.850.325.740,00	-1.499.290.740,00
	Jumlah	975.002.655,86	3.153.866.371,24	-2.178.863.715,38

Dari realisasi pendapatan retribusi tersebut didalamnya terdapat pendapatan retribusi yang masih berupa piutang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	221.377.832,00
2	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	561.650.000,00
	Jumlah	783.027.832,00

5.3.1.1 3 Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	8.304.817.104,48	21.929.601.010,50	-13.624.783.906,02

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan-LO	440.488.700,00	119.097.099,00	321.391.601,00
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	372.052.700,00	27.597.099,00	344.455.601,00
	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	68.436.000,00	91.500.000,00	-23.064.000,00
2	Jasa Giro-LO	854.433.319,00	1.662.990.103,00	-808.556.784,00
	Jasa Giro Pada Kas Daerah-LO	732.837.481,00	1.451.059.242,00	-718.221.761,00
	Jasa Giro Pada Kas Di Bendahara-LO	121.595.838,00	211.930.861,00	-90.335.023,00
3	Pendapatan Bunga atas Pemempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.277.190.627,72	6.526.261.840,47	-2.249.071.212,75
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	4.277.190.627,72	6.526.261.840,47	-2.249.071.212,75
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.895.951,86	3.183.402.316,02	-3.179.506.364,16
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	3.895.951,86	3.183.402.316,02	-3.179.506.364,16
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.446.650,90	369.500.968,45	-367.054.317,55
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	2.446.650,90	369.500.968,45	-367.054.317,55
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah- LO	1.650.617.577,00	6.340.186.612,90	-4.689.569.035,90
	Pendapatan denda pajak hotel-LO	120.263.086,00	176.719.829,00	-56.456.743,00
	Pendapatan denda pajak restoran-LO	492.244.281,00	728.861.289,00	-236.617.008,00
	Pendapatan denda pajak hiburan-LO	8.730.178,00	22.413.835,00	-13.683.657,00
	Pendapatan denda pajak reklame-LO	179.467,00	9.125,00	170.342,00
	Pendapatan denda pajak parkir-LO	6.063.053,00	11.755.684,00	-5.692.631,00
	Pendapatan denda pajak air tanah-LO	11.261.131,00	32.731.670,44	-21.470.539,44
	Pendapatan denda pajak MBLB-LO	15.058.815,00	47.274.753,00	-32.215.938,00
	Pendapatan denda pajak PBBP2-LO	996.817.566,00	5.320.420.427,46	-4.323.602.861,46
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -LO	86.486.984,00	144.395.498,16	-57.908.514,16
	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dari gaji dan tunjangan - LO	86.486.984,00	144.395.498,16	-57.908.514,16
8	Pendapatan dari BLUD - LO	867.227.900,00	2.574.757.777,25	-1.707.529.877,25
	Pendapatan Kontribusi Penguatan Modal - LO	0,00	2.393.756.250,00	-2.393.756.250,00
	Pendapatan Jasa Giro dan Tabungan BLUD - LO	0,00	176.355.671,00	-176.355.671,00
	Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah - LO	98.443.400,00	4.645.856,25	93.797.543,75
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan - LO	768.784.500,00	0,00	768.784.500,00
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	7.960.000,00	0,00	7.960.000,00
10	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO	114.069.394,00	1.009.008.795,25	-894.939.401,25
	Pendapatan Infaq-LO	114.069.394,00	1.009.008.795,25	-894.939.401,25
	Jumlah	8.304.817.104,48	21.929.601.010,50	-13.624.783.906,02

5.3.1.2 Pendapatan Transfer

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer - LO	1.034.430.366.099,00	1.941.783.001.325,88	(907.352.635.226,88)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah..Realisasi Pendapatan Trasfer per 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	791.332.408.325,00	1.400.012.073.781,00	-608.679.665.456,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00	-57.667.332.200,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.968.021.474,00	368.973.659.044,88	-241.005.637.570,88
	Jumlah	1.034.430.366.099,00	1.941.783.001.325,88	-907.352.635.226,88

5.3.1.2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	791.332.408.325,00	1.400.012.073.781,00	(608.679.665.456,00)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan penerimaan dari pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	21.153.559.950,00	63.146.898.548,00	-41.993.338.598,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	571.751.785.692,00	971.708.817.535,00	-399.957.031.843,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	2.896.850.999,00	23.251.738.208,00	-20.354.887.209,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	195.530.211.684,00	341.904.619.490,00	-146.374.407.806,00
	Jumlah	791.332.408.325,00	1.400.012.073.781,00	-608.679.665.456,00

5.3.1.2 1 a. Dana Bagi Hasil

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dana Bagi Hasil	21.153.559.950,00	63.146.898.548,00	-41.993.338.598,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DBH PBB-LO	363.366.900,00	4.130.241.652,00	(3.766.874.752,00)
2	DBH PPH Pasal 21-LO	18.937.407.600,00	55.390.272.000,00	(36.452.864.400,00)
3	DBH CHT-LO	1.519.147.500,00	2.340.026.896,00	(820.879.396,00)
4	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	2.059.200,00	4.582.000,00	(2.522.800,00)
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	479.250,00	1.060.000,00	(580.750,00)
6	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	8.956.200,00	47.582.000,00	(38.625.800,00)
7	DBH SDA Perikanan-LO	322.143.300,00	1.233.134.000,00	(910.990.700,00)
	Jumlah	21.153.559.950,00	63.146.898.548,00	(41.993.338.598,00)

5.3.1.2 1 b. Dana Alokasi Umum

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Umum	571.751.785.692,00	971.708.817.535,00	-399.957.031.843,00

Realisasi Dana Alokasi Umum dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAU-LO	537.830.307.000,00	971.708.817.535,00	(433.878.510.535,00)
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	13.447.798.692,00	0,00	13.447.798.692,00
3	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan-LO	12.022.084.000,00	0,00	12.022.084.000,00
4	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan-LO	6.187.767.000,00	0,00	6.187.767.000,00
5	DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum-LO	2.263.829.000,00	0,00	2.263.829.000,00
	Jumlah	571.751.785.692,00	971.708.817.535,00	(399.957.031.843,00)

5.3.1.2 1 c. Dana Alokasi Khusus-Fisik

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Khusus-Fisik	2.896.850.999,00	23.251.738.208,00	-20.354.887.209,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-PAUD-LO	0,00	507.761.000,00	(507.761.000,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SD-LO	0,00	1.508.223.205,00	(1.508.223.205,00)
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Regular-SMP-LO	0,00	2.360.199.358,00	(2.360.199.358,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	840.000.000,00	11.284.060.387,00	(10.444.060.387,00)
5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	0,00	3.957.363.116,00	(3.957.363.116,00)
6	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	651.624.999,00	2.068.299.182,00	(1.416.674.183,00)
7	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	468.000.000,00	0,00	468.000.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	1.255.087.960,00	(1.255.087.960,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	937.226.000,00	310.744.000,00	626.482.000,00
	Jumlah	2.896.850.999,00	23.251.738.208,00	(20.354.887.209,00)

5.3.1.2 1 d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	195.530.211.684,00	341.904.619.490,00	-146.374.407.806,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Regular-LO	0,00	121.705.551.926,00	(121.705.551.926,00)
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	5.485.000.000,00	(5.485.000.000,00)
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	88.433.085.400,00	157.455.627.000,00	(69.022.541.600,00)
4	DAK Non Fisik-TAMSIL GURU PNSD-LO	1.614.860.500,00	3.111.020.714,00	(1.496.160.214,00)
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	3.907.620.000,00	(3.907.620.000,00)
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	24.394.586.000,00	(24.394.586.000,00)
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	4.935.992.239,00	6.904.904.237,00	(1.968.911.998,00)
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	96.950.723,00	673.321.000,00	(576.370.277,00)
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	10.719.759.000,00	(10.719.759.000,00)
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	5.215.011.245,00	(5.215.011.245,00)
11	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	248.808.300,00	416.952.460,00	(168.144.160,00)
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan-LO	479.000.000,00	0,00	479.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	398.808.865,00	363.442.826,00	35.366.039,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	3.530.747.120,00	0,00	3.530.747.120,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	160.443.150,00	444.097.625,00	(283.654.475,00)
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	1.374.189.720,00	1.107.725.457,00	266.464.263,00
17	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan-LO	986.380.000,00	0,00	986.380.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Regular-LO	66.116.400.000,00	0,00	66.116.400.000,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Regular-LO	12.512.400.000,00	0,00	12.512.400.000,00
21	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Regular-LO	2.530.850.000,00	0,00	2.530.850.000,00
22	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	12.111.295.667,00	0,00	12.111.295.667,00
	Jumlah	195.530.211.684,00	341.904.619.490,00	(146.374.407.806,00)

5.3.1.2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00	-57.667.332.200,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	48.593.705.000,00	(48.593.705.000,00)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	99.565.067.800,00	124.203.563.500,00	(24.638.495.700,00)
5	Insentif Fiskal	15.564.868.500,00	0,00	15.564.868.500,00
	Jumlah	115.129.936.300,00	172.797.268.500,00	(57.667.332.200,00)

5.3.1.2 2 a. Dana Insentif Daerah

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana insentif daerah.

5.3.1.2 2 b. Dana Otonomi Khusus

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana otonomi khusus.

5.3.1.2 2 c. Dana Keistimewaan
Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana keistimewaan.

5.3.1.2 2 d. Dana Desa	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Dana Desa	99.565.067.800,00	124.203.563.500,00	-24.638.495.700,00

5.3.1.2 2 e. Insentif Fiskal	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Insentif Fiskal	15.564.868.500,00	0,00	15.564.868.500,00

5.3.1.2 3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.968.021.474,00	368.973.659.044,88	-241.005.637.570,88

Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi yang terdiri dari:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	70.467.630.474,00	292.545.187.886,00	(222.077.557.412,00)
2	Bantuan Keuangan	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88	-18.928.080.158,88
	Jumlah	127.968.021.474,00	368.973.659.044,88	(241.005.637.570,88)

5.3.1.2 3 a. Pendapatan Bagi Hasil	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Bagi Hasil	70.467.630.474,00	292.545.187.886,00	-222.077.557.412,00

Bagi Hasil dari pemerintah provinsi yang terdiri dari:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	22.696.497.709,00	103.675.335.242,00	(80.978.837.533,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO	9.826.037.334,00	49.191.696.416,00	(39.365.659.082,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	16.769.146.870,00	87.297.460.819,00	(70.528.313.949,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	16.431.565,00	55.040.742,00	(38.609.177,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	21.159.516.996,00	52.325.654.667,00	(31.166.137.671,00)
	Jumlah	70.467.630.474,00	292.545.187.886,00	(222.077.557.412,00)

5.3.1.2 3 b. Bantuan Keuangan	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Bantuan Keuangan	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88	-18.928.080.158,88

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Khusus dari Pemerintah provinsi. Realisasi Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah provinsi terdiri dari:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88	(18.928.080.158,88)
	Jumlah	57.500.391.000,00	76.428.471.158,88	(18.928.080.158,88)

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	-5.433.196.532,00

Realisasi Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	(5.433.196.532,00)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	-
	Jumlah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	(5.433.196.532,00)

5.3.1.3 1 Pendapatan Hibah	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan Hibah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	-5.433.196.532,00

Realisasi Pendapatan Hibah merupakan pendapatan hibah dari pihak lain yang sah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	(5.433.196.532,00)
	Jumlah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	(5.433.196.532,00)

5.3.1.3 2 Pendapatan Dana Darurat
Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan dana darurat.

5.3.1.3 3 Pendapatan Lainnya
Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mendapatkan pendapatan lainnya.

5.3.2 Beban	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Beban	286.446.054.551,20	601.836.902.428,66	-315.390.847.877,46

Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah atau bendahara pengeluaran.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri atas beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Selama tahun 2024 Beban diklasifikasikan dalam kelompok besar yaitu beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga. Adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Bertambah (Berkurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Operasi	75.181.132.955,56	117.951.296.052,25	(42.770.163.096,69)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.057.712.675,64	4.472.829.451,41	(2.415.116.775,77)

3	Beban Transfer	201.553.768.220,00	464.819.528.455,00	(263.265.760.235,00)
4	Beban tak terduga	7.653.440.700,00	14.593.248.470,00	(6.939.807.770,00)
Jumlah		286.446.054.551,20	601.836.902.428,66	(315.390.847.877,46)

5.3.2.1 Beban Operasi

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Operasi	75.181.132.955,56	117.951.296.052,25	-42.770.163.096,69

Rincian Beban Operasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Pegawai	17.197.759.152,65	32.894.372.254,50	(15.696.613.101,85)
2	Beban Barang dan Jasa	37.047.963.291,25	72.723.338.198,46	(35.675.374.907,21)
3	Beban Penyisihan Piutang	20.935.410.511,66	12.333.585.599,29	8.601.824.912,37
Jumlah		75.181.132.955,56	117.951.296.052,25	(42.770.163.096,69)

5.3.2.1 1 Beban Pegawai

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Pegawai	17.197.759.152,65	32.894.372.254,50	-15.696.613.101,85

Rincian beban pegawai per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.795.000.280,00	4.513.019.860,00	(1.718.019.580,00)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	243.005.808,00	407.071.496,00	(164.065.688,00)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	109.840.000,00	298.190.000,00	(188.350.000,00)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	257.730.000,00	4.900.000,00	252.830.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.235.000,00	145.760.000,00	(61.525.000,00)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	128.473.080,00	229.933.500,00	(101.460.420,00)
7	Beban Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	64.092.800,00	31.220.037,00	32.872.763,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	37.794,00	63.421,00	(25.627,00)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	144.430.101,00	275.005.922,00	(130.575.821,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.016.102,00	9.246.020,00	(4.229.918,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	15.048.463,00	27.738.426,00	(12.689.963,00)
12	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	525.430.555,00	1.004.401.492,00	(478.970.937,00)
13	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	635.888.100,00	1.513.203.030,00	(877.314.930,00)
14	Beban Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.976.506.069,65	23.865.058.350,50	(11.888.552.280,85)
15	Beban Honorarium	161.175.000,00	460.907.700,00	(299.732.700,00)
16	Beban Jasa Pengelolaan BMD	33.250.000,00	72.275.000,00	(39.025.000,00)
17	Beban Pegawai BLUD	18.600.000,00	36.378.000,00	(17.778.000,00)
Jumlah		17.197.759.152,65	32.894.372.254,50	(15.696.613.101,85)

5.3.2.1 2 Beban Barang dan Jasa

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Barang dan Jasa	37.047.963.291,25	72.723.338.198,46	-35.675.374.907,21

Rincian beban barang dan jasa diakui untuk beban-beban sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	2.024.963.828,94	4.313.932.463,46	(2.288.968.634,52)
	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	718.000,00	(718.000,00)
2	Beban Jasa Kantor	27.289.093.573,67	54.456.012.898,00	(27.166.919.324,33)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	99.673.100,00	142.608.750,00	(42.935.650,00)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	222.400.000,00	36.250.000,00	186.150.000,00
5	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	0,00	894.881.695,00	(894.881.695,00)
6	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.800.000,00	230.600.000,00	(207.800.000,00)
7	Belanja Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	221.000.000,00	0,00	221.000.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295.642.285,00	740.654.098,00	(445.011.813,00)
9	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	159.359.137,64	635.868.822,00	(476.509.684,36)
10	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	45.377.000,00	143.112.000,00	(97.735.000,00)
	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)
11	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.765.953.783,00	1.191.677.435,00	1.574.276.348,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.674.226.000,00	9.332.676.250,00	(5.658.450.250,00)
13	Beban Barang dan Jasa BLUD	227.474.583,00	590.345.787,00	(362.871.204,00)
Jumlah		37.047.963.291,25	72.723.338.198,46	(35.675.374.907,21)

5.3.2.1 3 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	20.935.410.511,66	12.333.585.599,29	8.601.824.912,37

Rincian realisasi beban penyisihan piutang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	112.253.877,85	528.856.725,83	(416.602.847,98)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	46.585.645,96	7.208.641,57	39.377.004,39
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	14.811.600,91	9.743.580,67	5.068.020,24
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	25,22	630.000,00	(629.974,78)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	525.561,01	50.391,00	475.170,01
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	7.880.213,52	8.391.060,04	(510.846,52)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak MBLB	308.017,50	0,00	308.017,50
8	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	20.717.006.089,69	11.353.317.788,13	9.363.688.301,56
9	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	36.039.480,00	32.631.785,75	3.407.694,25
10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	392.755.626,30	(392.755.626,30)
Jumlah		20.935.410.511,66	12.333.585.599,29	8.601.824.912,37

5.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.057.712.675,64	4.472.829.451,41	-2.415.116.775,77

Beban penyusutan merupakan penurunan nilai masa manfaat atas aset tetap. Beban penyusutan per 30 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	637.683.411,98	1.528.020.131,68	(890.336.719,70)

2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.288.307.583,50	2.576.497.126,42	(1.288.189.542,92)
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.379.316,34	6.758.632,68	(3.379.316,34)
4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	128.342.363,82	361.553.560,63	(233.211.196,81)
Jumlah		2.057.712.675,64	4.472.829.451,41	(2.415.116.775,77)

5.3.2.2 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat-Alat Bantu	5.052.142,86	10.104.285,72	(5.052.142,86)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	110.810.229,02	186.010.303,28	(75.200.074,26)
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	375.000,00	(375.000,00)
4	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	2.181.150,00	4.362.300,00	(2.181.150,00)
5	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	108.000,00	400.600,00	(292.600,00)
6	Beban Penyusutan Alat Ukur	2.739.999,96	5.960.166,67	(3.220.166,71)
7	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	497.916,68	668.750,00	(170.833,32)
8	Beban Penyusutan Alat Kantor	87.366.900,92	183.360.575,31	(95.993.674,39)
9	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	202.675.521,84	342.681.004,03	(140.005.482,19)
10	Beban Penyusutan Alat Studio	10.513.220,01	20.593.290,00	(10.080.069,99)
11	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	6.006.049,98	0,00	6.006.049,98
12	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	1.987.248,48	5.313.580,34	(3.326.331,86)
13	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
14	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	2.678.749,98	4.827.885,42	(2.149.135,44)
15	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	62.500,02	125.000,00	(62.499,98)
16	Beban Penyusutan Komputer Unit - Personal Computer	156.009.338,50	305.687.125,24	(149.677.786,74)
17	Beban Penyusutan Peralatan Komputer -Peralatan Mainframe	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
18	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal	41.551.677,07	439.869.099,00	(398.317.421,93)
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.466.166,66	17.625.666,67	(16.159.500,01)
20	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	66.600,00	55.500,00	11.100,00
Jumlah		637.683.411,98	1.528.020.131,68	(890.336.719,70)

5.3.2.2 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.288.307.583,50	2.576.497.126,42	(1.288.189.542,92)
Jumlah		1.288.307.583,50	2.576.497.126,42	(1.288.189.542,92)

5.3.2.2 3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	495.835,98	991.672,00	(495.836,02)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	357.816,24	715.632,50	(357.816,26)
3	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	291.380,76	582.761,50	(291.380,74)
4	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	1.310.283,36	2.620.566,68	(1.310.283,32)
5	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan telepon diatas Tanah	591.250,02	1.182.500,00	(591.249,98)
6	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih atau air baku lainnya	332.749,98	665.500,00	(332.750,02)
Jumlah		3.379.316,34	6.758.632,68	-3.379.316,34

5.3.2.2 4 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	128.342.363,82	361.553.560,63	-233.211.196,81

5.3.2.3 Beban Transfer

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Transfer	201.553.768.220,00	464.819.528.455,00	-263.265.760.235,00

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Sleman ke entitas pelaporan lain. Anggaran Belanja Transfer tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	25.427.906.385,00	75.646.488.000,00	(50.218.581.615,00)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	2.020.894.053,00	4.625.269.080,00	(2.604.375.027,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/Kota	259.071.000,00	168.105.000,00	90.966.000,00
4	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	144.625.610,00	123.923.420,00	20.702.190,00
5	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	248.173.754.450,00	(248.173.754.450,00)
6	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	173.701.271.172,00	136.081.988.505,00	37.619.282.667,00
Jumlah		201.553.768.220,00	464.819.528.455,00	-263.265.760.235,00

5.3.2.4 Beban Tak Terduga

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Beban Tak Terduga	7.653.440.700,00	14.593.248.470,00	-6.939.807.770,00

Rincian realisasi Beban Tak Terduga sebagai berikut:

No.	Uraian	30 Juni 2024 (Rp)
1	Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun pajak 2023	8.286.500,00
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB	362.704.400,00
3	Pengembalian dana BOS PAUD tahun 2023	3.900.000,00
4	Bantuan sosial tidak terencana untuk JPS	6.999.999.800,00
5	Bantuan sosial tidak terencana untuk korban bencana	278.550.000,00
Jumlah		7.653.440.700,00

5.3.3 Surplus/Defisit LO

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Surplus/Defisit LO	1.227.117.840.140,14	2.255.851.823.309,81	-1.028.733.983.169,67

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Awal	201.312.278.189,45	285.447.104.186,61	-84.134.825.997,16

Ekuitas awal per 31 Desember 2024 merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Surplus/Defisit LO	1.227.117.840.140,14	2.255.851.823.309,81	-1.028.733.983.169,67

Surplus/Defisit LO Tahun 2024 merupakan Surplus LO Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Pendapatan:			
Pendapatan Asli Daerah	475.042.075.319,34	906.381.074.607,59	-431.338.999.288,25
Pendapatan Transfer	1.034.430.366.099,00	1.941.783.001.325,88	-907.352.635.226,88
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.091.453.273,00	9.524.649.805,00	-5.433.196.532,00
Jumlah Pendapatan	1.513.563.894.691,34	2.857.688.725.738,47	-1.344.124.831.047,13
Beban:			
Beban Operasi	75.181.132.955,56	117.951.296.052,25	-42.770.163.096,69
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.057.712.675,64	4.472.829.451,41	-2.415.116.775,77
Beban Transfer	201.553.768.220,00	464.819.528.455,00	-263.265.760.235,00
Beban Tak Terduga	7.653.440.700,00	14.593.248.470,00	-6.939.807.770,00
Jumlah Beban	286.446.054.551,20	601.836.902.428,66	-315.390.847.877,46
Surplus dari Operasi	1.227.117.840.140,14	2.255.851.823.309,81	-1.028.733.983.169,67
Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
Surplus-LO	1.227.117.840.140,14	2.255.851.823.309,81	-1.028.733.983.169,67

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2.715.537.146,14	13.487.151.713,80	-10.771.614.567,66
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	24.034.260,53	-24.034.260,53
Lain-lain	2.715.537.146,14	13.463.117.453,27	-10.747.580.307,13

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk mencatat terjadinya koreksi dari pencatatan pada neraca tahun sebelumnya.
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.3.1 Lain-lain

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Lain-lain	2.715.537.146,14	13.463.117.453,27	-10.747.580.307,13

Rincian Lain-lain per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Koreksi Kurang (Rp)	Koreksi Tambah (Rp)
1	Koreksi tambah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	2.796.868.766,00
2	Koreksi kurang Piutang PBJT-Restoran	19,51	0,00
3	Koreksi tambah Piutang PBJT-Restoran	0,00	33,34
4	Koreksi tambah Piutang Pajak Reklame Papan /Billboard / Videotron / Megatron	0,00	28,31
5	Koreksi kurang Piutang Pajak Reklame Papan /Billboard / Videotron / Megatron	3,09	0,00
6	Koreksi kurang Piutang PBJT-Hotel	6,42	0,00
7	Koreksi tambah Piutang PBJT-Hotel	0,00	5,84
8	Mencatat Pengabungan Simpad tahun lalu	81.331.658,33	0,00
	Jumlah	81.331.687,35	2.796.868.833,49

5.4.4 Ekuitas Akhir

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Akhir	198.915.734.226,07	201.312.278.189,45	-2.396.543.963,38

Ekuitas Akhir merupakan saldo ekuitas per 30 Juni 2024, yang berasal dari:

Uraian	30 Juni 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
Ekuitas Awal	201.312.278.189,45	285.447.104.186,61	79.341.738.070,40
Surplus/Defisit LO	1.227.117.840.140,14	2.255.851.823.309,81	-1.028.733.983.169,67
RK PPKD	-1.232.229.921.249,66	-2.353.473.801.020,77	1.121.243.879.771,11
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	2.715.537.146,14	13.487.151.713,80	-10.771.614.567,66
Ekuitas Akhir	198.915.734.226,07	201.312.278.189,45	-2.396.543.963,38